

ANALISIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SERANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Dalam Programstudi Ilmu Administrasi Publik



Alipsyah Barlin
6661141856

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, NOVEMBER
2018**

ABSTRAK

Alipsyah Barlin. 6661141856. Analisis Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I : Leo Agustino,Ph.D . Dosen Pembimbing II: Dr. Gandung Ismanto

Kota Serang merupakan Kota berciri Agraris dengan 71% lahan budidaya pertanian. Namun justru yang menjadi tulang punggung ekonomi adalah sektor perdagangan dengan 22% kontribusi terhadap PDRB sementara pertanian hanya 6%. Penelitian ini bertujuan menentukan arah kebijakan pembangunan kota serang dengan menggunakan *SWOT dan Location Quotient analysis*. Jenis penelitian ini adalah *ex-post facto* yaitu menganalisis data-data dimasa lampau (PDRB,IPM,LPE,TPT,angka kemiskinan) untuk membaca gejala-gejala yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Motode yang digunakan adalah metode campuran setelah menganalisis data kuantitatif maka akan dibuat rekomendasi kebijakan berdasarkan penilaian para ahli (*Expert judgement*). Hasil penelitian ini adalah strategi pembangunan Kota Serang untuk tahun 2019-2024 adalah *S-O strategy* yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki Kota Serang untuk mengambil semua peluang yang ada. Peluang yang dimaksud adalah ekonomi kreatif,ekonomi digital, bonus demografi dan investasi. Sementara kekuatan Kota Serang terletak pada daya beli masyarakat yang tinggi, pertumbuhan UMKM, dan posisi goestrategis Kota Serang. Sementara hasil analisis LQ mengarahkan kebijakan pembangunan pada sektor : Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, Konstruksi, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Jasa pendidikan, Real estate, dan Jasa lainnya.

Kata kunci : *Location Quotient, SWOT, Arah Kebijakan, Strategi.*

ABSTRACT

Alipsyah Barlin. 6661141856. Analysis of strategy and The Direction Development Policy of Serang City. Public Administration Department, Faculty of Social and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. Thesis Advisor I: Leo Agustino, Ph.D . Thesis Advisor II: Dr. Gandung Ismanto

Serang city is agricultural city with 71% cultivation farmland. As opposed to it, trade sector is becoming the economy main support with 22% contribution to Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) whilst agricultural only 6%. This research aimed to determine the direction of development policy of Serang City using SWOT and Location Quotient Analysis. This research used ex-post facto which analyzed data in the past (GRDP, HDI, LPE, Unemployment Rate and poverty rate) to read tendencies that might happen in the future. In this study the researcher used mix method after analyze quantitative data that will be created into recommendation policy based on the expert judgment. This research resulted in development strategy of Serang city in 2019-2024 is S-O strategy using the power from its city to take all the available chances. Chance refers to creative economy, digital economy, demography bonus and investment. Meanwhile Serang's strength located in the high of people's purchasing power, the growth of small and medium enterprises (UMKM), and Serang geostrategy position. In the meantime result analyse of LQ directing the development policy to the sector : government administration, defense and compulsory social security, macro and retail trading; car and motorcycle reparation, transportation and warehousing, construction, health service and social occasion, education, real estate and other service.

Keywords: Location Quotient, SWOT, Direction Policy, strategy.

LEMBAR PERSETUJUAN


Nama : Alipsyah Barlin
NIM : 6661141856
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KOTA SERANG

Serang, November 2018

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I



Leo Agustino Ph.D
NIP. 19740803200312001

Pembimbing II



Dr. Gandung Ismanto., M.M
NIP. 197408072005011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M. Si
NIP. 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Alipsyah Barlin
NIM : 6661141856
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KOTA SERANG

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 28
November 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 28 November 2018

Ketua Penguji
Listyaningsih, M.si
NIP. 197603292003122001

Anggota :
Kandung Sapto Nugroho., M.Si
NIP. 197809182005011002

Anggota :
Dr. Gandung Ismanto., M.M
NIP. 197408072005011001

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sijafari, M.Si
NIP.197108242005011002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Listyaningsih, M.Si
NIP. 197603292003122001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alipsyah Barlin
NIM : 6661141856
Tempat tanggal lahir : Serang, 03 November 1996
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang" adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 28 November 2018




Alipsyah Barlin

NIM. 6661141856

ALLAH FIRST, SO YOU NEVER BE THE LAST

Persembahan :

“Skripsi ini Arlin Persembahkan untuk Ibu Ayah beserta kedua adikku, Keluarga H. Ace Jami’at Aziz yang telah memberikan doa tulusnya, serta motivasi secara moral dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini”.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr., Wb.,

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para umatnya.

Hasil penelitian ini, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul “**Analisis Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang**”.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi maupun keterangan-keterangan atau informasi yang sangat berguna dari berbagai pihak hingga tersusunnya skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tiada terkira kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini khususnya:

1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si. Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, M.Ikom. Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S. Sos., M.Si. Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Dr. Arenawati Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Leo Agustino, Ph.D sebagai dosen pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing penelitian skripsi ini dan berkenan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
9. Dr. Ismanto sebagai dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingan, nasihat dan motivasinya kepada penulis.

10. Seluruh Dosen pada Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama masa perkuliahan.
11. Walikota Terpilih Kota Serang H. Syafruddin, M.Si yang telah memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai ahli.
12. Kepala BAPPEDA Kota Serang Ir. Joko Sutrisno yang telah memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai ahli.
13. Anggota DPRD Kota Serang Kevin Harinusa, MH yang telah memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai ahli.
14. Ketua MUI Dr. H. Amas Tajudin yang telah memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai ahli.
15. Ahli Perencanaan Pembangunan Kandung Sapto Nugroho, M.Si yang telah memberikan pendapatnya dalam penelitian ini sebagai ahli.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti.
17. Badan Pusat Statistik Kota Serang yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti.
18. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti.
19. Kedua Orang Tua-ku yang selalu membimbing dan mengantarkan anaknya sampai ke dalam tahap perguruan tinggi. Terimakasih banyak Ibu, Ayah. Dan saudara-saudariku Bang Kevin dan Baza.

20. Keluarga besar DJ dan M. Nawawi Isya yang telah memberikan doa tulusnya, serta motivasi secara moral dan materil dalam penyelesaian studi peneliti.
21. Sahabat seperjuangan Kak Yandi, Kak Ali, Dhika, Adhi, Farki, Dedin, Apud, Ajityas, Nazar, Ayi, Pipit, Meli, Tami, Olis, Asih, Iyun, Opi, Desita, Nurokta, Aris, Okky, Eka, Ismail, Ridho, Aab, yang telah membantu, menolong, dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan Administrasi Negara/Publik angkatan 2014. Semoga kami semua dapat berjuang dan sukses bersama.
22. Keluarga Fosmai Fisip dan pengurus Himane 2015, Himane 2016, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar ber-organisasi dan mengembangkan diri.
23. Semua pihak yang telah membantu penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca terutama untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Serang, 28 November 2018

Alipsyah Barlin

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR	Ii
DAFTAR ISI	Vi
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	Xii
DAFTAR LAMPIRAN	Xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Batasan Masalah	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori	19
2.1.1 Kebijakan Publik	19
2.1.1.1 Analisis Kebijakan Publik.....	27
2.1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan	37
2.1.2.1 Perencanaan Pembangunan Era OTDA	39
2.1.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	41
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Berfikir	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	50
3.2 Fokus Penelitian	51
3.3 Lokasi Penelitian	52
3.4 Variabel Penelitian	52
3.4.1 Definisi Konsep	52
3.4.2 Definisi Operasional	54
3.5 Jenis dan Sumber Data	55
3.6 Populasi dan Sampel	55
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58

3.7.1 Analisis LQ	59
3.7.2 Analisis SWOT	61

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	69
4.2 Deskripsi Data	76
4.2.1 Struktur Ekonomi Daerah	77
4.2.2 Indeks Pembangunan Manusia	84
4.2.3 Angka Kemiskinan.....	87
4.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	90
4.3 Pembahasan.....	92
4.3.1 Evaluasi.....	94
4.3.2 Rekomendasi.....	102

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	135
5.2 Saran	136

DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
---------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1	Kontribusi berbagai sektor pada PDRB Kota Serang tahun 2016-2017.	7
1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014-2017.....	9
2.1	Prosedur Analisis Kebijakan.....	29
3.1	Definisi Operasional Penelitian.....	55
3.2	<i>List Of Expert</i>	56
3.3	IFAS.....	64
3.4	EFAS.....	66
3.6	Matriks TOWS.	67
4.1	Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan.....	68
4.2	Lahan di Kota Serang Berdasarkan RTRW Kota Serang 2010-2030.....	70
4.3	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 – 2016.....	73
4.4	Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2017.....	75
4.5	Perkembangan PDRB Kota Serang	77
4.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	78
4.7	Indeks Pembangunan Manusia.....	81
4.8	IPM per Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2014-2016.....	85
4.9	Persentase Penduduk Miskin di Kota Serang.....	87
4.10	Aspek Ketenagakerjaan Kota Serang.....	90
4.11	Perhitungan Koefisien Lokasi.....	94
4.12	Internal Factor Analisis Summary.....	101
4.13	External Factor Analisis Summary.....	103
4.14	Matriks OSTW.....	126

DAFTAR GAMBAR

1.1 Luas Lahan per Kecamatan.....	4
1.2 Visi Calon Walikota Serang.....	13
1.3 Tahapan Oprasionalisasi Visi RPJMD.....	16
2.1 Prosedur Analisis Kebijakan.....	28
2.2 Bentuk analisis kebijakan.....	36
2.3 Proses Kerangka Berfikir.....	49
3.4 <i>Step Involyet In Secondary Data</i>	59
4.1 Penataan RPJPD Kota Serang 2008-2025.....	62
4.2 Titik Kordnat IFAS-EFAS.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu pembangunan merupakan isu yang menarik dewasa ini. Sejak tahun 2005 sistem pembangunan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup fundamental, dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Pola pembangunan yang semula sentralistik (*top-down*) menjadi desentralistik (*bottom-up*). Pemerintah Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri. Hal ini kemudian berdampak secara langsung terhadap pembangunan nasional oleh karena itu perencanaan merupakan aspek yang vital dalam menyambungkan atau mengintegrasikan pembangunan di tingkat daerah dengan pembangunan di tingkat nasional.

Perencanaan merupakan aspek yang penting dalam melakukan setiap kegiatan dari yang memiliki skala mikro sampai skala makro seperti negara. Perencanaan pembangunan ialah suatu program untuk strategi pemerintah nasional, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi permainan kekuatan-kekuatan pasar supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. Indonesia sebagai negara yang besar memiliki berbagai tantangan dalam melakukan perencanaan pembangunan ekonominya. Letak geografis yang beranekaragam membuat Indonesia sulit melakukan pemerataan pembangunan

perekonomian. Di dalam jangka panjang pemerintah harus menghantarkan masyarakat Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan, serta harus mengatasi masalah jangka panjang seperti masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam jangka pendek, pemerintah dituntut untuk selalu dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sedangkan di pihak lain harus dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi jangka pendek. Pada dasarnya, keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuannya menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek.

Selanjutnya, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul pada saat dan pasca krisis 1997 terutama dengan meningkatnya utang pemerintah yang memerlukan pengelolaan jangka panjang yang tepat dengan tetap menjaga terwujudnya keberlanjutan fiskal, peningkatan disiplin pergaulan perekonomian global yang semakin tinggi serta mengarah pada ketidakpastian akhir-akhir ini, menjadi dasar utama perumusan arah kebijakan dan prioritas yang harus diambil dalam jangka panjang. Permasalahan lain seperti tingginya kesenjangan pembangunan antar daerah, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, kurang optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, serta masih

banyaknya permasalahan sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam, dan gejala disintegrasi sosial merupakan permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia.

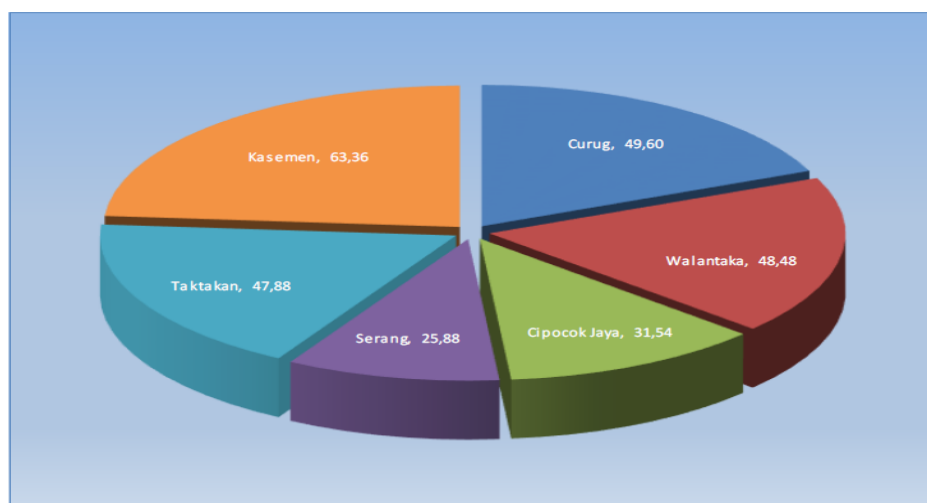
Penjelasan di atas memberikan gambaran perlunya penentuan arah kebijakan dan prioritas kebijakan di tingkat daerah, karena penyelesaian permasalahan ditingkat daerah akan otomatis menyelesaikan permasalahan ditingkat nasional dengan pola pembangunan di Indonesia saat ini (desentralisasi). Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat dua pola pembangunan berdasarkan bentuk daerah yaitu kota atau kabupaten. Secara umum terdapat perbedaan karakteristik bentuk daerah ini yaitu pada aspek pelaksanaan urusan pilihan. Daerah kabupaten bertumpu pada struktur ekonomi primer sementara kota bertumpu pada struktur ekonomi sekunder dan tersier. Dengan demikian urusan pilihan dan pola pembangunan dapat diarahkan berdasarkan potensi dan sektor-sektor unggulan daerah yang bersangkutan. Namun bagaimana jika ada satu daerah yang memiliki ciri agraris namun berbentuk kota.

Kota Serang merupakan daerah otonomi hasil pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten. Unikny Kota Serang tidak lahir alamiah seperti kota-kota pada umumnya. Umumnya kota-kota lahir sebagai pusat perdagangan dan jasa yang kemudian memisahkan diri sebagai daerah otonomi sendiri meninggalkan ciri agrarisnya. Namun Kota Serang lahir akibat konsekuensi Banten menjadi provinsi. Banten menjadi satu-satunya daerah di Indonesia kala

itu, yang memiliki ibukota provinsi di kabupaten. Dengan demikian Kota Serang lahir sebagai persamaan terhadap daerah-daerah lainya.

Kota Serang terdiri dai 6 kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Cipocok, Kecamatan Curug, Kota Serang Memiliki luas wilayah 266,77km² dengan jumlah penduduk sekitar 655,004 jiwa (data penduduk perdesember 2017) dan batas wilayah sebelah Utara yaitu Teluk Banten sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan Kecamatan Baros Kabupaten Serang, serta sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Dari 6 kecamatan tersebut terdiri dari 66 kelurahan.

Gambar 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Serang (km²), 2016
Picture Total Area by Subdistrict in Serang Municipality (square.km), 2016



(Sumber: BPS Kota Serang 2016)

Kota Serang merupakan daerah terkecil kedua berdasarkan luas wilayahnya setelah Kota Tangerang Selatan sementara berdasarkan pola pemanfaatan lahan sebagian besar merupakan kawasan pertanian, maka Kota Serang secara alamiah adalah Kota yang masih berciri agraris meski kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terbilang sangat kecil, yaitu sebesar $\pm 6\%$ saja pada kurun waktu lima tahun terakhir. Karenanya, dengan modalitas alamiahnya tersebut Kota Serang memiliki kesempatan dalam mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan yang masih potensial di sebagian kecamatan, guna menopang ketahanan pangan di Kota Serang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya bertransformasi ke sektor sekunder dan tersier. Kota Serang bahkan memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi pertanian, perkebunan, dan peternakannya untuk menopang industri yang berbasis pemanfaatan hasil-hasil pertanian sebagai bahan bakunya yang banyak berkembang di sepanjang wilayah bagian utara Provinsi Banten, serta memenuhi kebutuhan sejumlah pasar dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Serang dan sekitarnya. (Kota Serang dalam angka 2018 Hal : 3)

Dalam konteks demografi, jumlah penduduk Kota Serang mengalami rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,92 % per tahun dalam kurun waktu Tahun 2012-2016, dimana Kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya relatif rendah adalah Kecamatan Serang yaitu 0,89 %. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya Kota Serang sebagai kawasan pemukiman bagi kaum *urban commuter* yang bekerja di DKI Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya, dengan luas wilayah yang hanya seluas 266,74 km² maka

kepadatan penduduk di Kota Serang terbilang cukup tinggi, yang rata-rata mencapai 2.355 jiwa per km² pada tahun 2017 dengan Kecamatan Serang merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi yaitu sebesar 8.517 jiwa per km² meski luas wilayah Kecamatan Serang hanya sekitar 9,7% dari luas wilayah Kota Serang. Sementara Kecamatan Curug dan Kasemen merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah, yaitu masing-masing 1.073 dan 1.489 jiwa per km² meski kedua kecamatan ini merupakan kecamatan dengan wilayah paling luas di Kota Serang, hal ini menunjukkan sebaran penduduk di Kota Serang yang kurang merata. (Kota Serang dalam angka 2018 Hal : 19)

Narasi diatas menggambarkan kegamangan Kota Serang dalam menentukan pola pembangunan daerahnya. Berfokus pada sektor primer atau sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi penyebab kegalauan Kota Serang dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya.

Pertama, belum tercapainya Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2019 sebagai Kota Pendidikan. Dengan dimekarkannya Kota Serang dari Kabupaten Serang tentu status kota mempunyai konsekuensi alamiah di dalam masyarakat. struktur ruang wilayah Kota Serang yang sebagian besar masih berkarakter agraris, sementara sebagian kecil wilayah lainnya telah bertransformasi ke sektor sekunder sebagaimana dapat dilihat di wilayah Kecamatan Serang. Berdasarkan data BPS (2018), 70,85% lahan di Kota Serang masih dipergunakan sebagai lahan pertanian produktif; sisanya sekira 18,91% adalah lahan permukiman / perumahan; 4,32% adalah lahan milik perusahaan; 3,78% adalah perairan; dan

sisanya masing-masing kurang dari 1% merupakan hutan, industri / perdagangan, dan tanah jasa. Transformasi ini menjadi wajar apabila dilihat dari kontribusi sektor sekunder pada PDRB Kota Serang sebagai berikut :

(Tabel 1.1)
Kontribusi berbagai sektor pada PDRB Kota Serang tahun 2016-2017

KATEGORI SEKTOR	2016	2017
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,93	6,09
2. Pertambangan dan penggalan	0,01	0,01
3. Industri pengolahan	4,97	4,89
4. Pengadaan listrik, gas	0,18	0,17
5. Pengadaan air	0,02	0,02
6. Konstruksi	18,55	18,78
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	28,06	27,72
8. Transportasi dan pergudangan	4,72	4,80
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,39	6,41
10. Informasi dan komunikasi	3,87	3,84
11. Jasa keuangan dan asuransi	2,91	2,98
12. Real estate	8,96	8,86
13. Jasa perusahaan	0,91	0,93
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,30	6,30
15. Jasa pendidikan	4,20	4,21
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,03	2,05
17. Jasa lainnya	1,98	1,95
PDRB	100	100

Sumber : BPS Kota Serang : 2018

Seperti yang telah dipaparkan di atas, Kota Serang merupakan kota dengan luas lahan Budidaya pertanian seluas 71% dari total luas lahan di Kota Serang. Namun kontribusinya pada PDRB hanya sebesar 6% saja. Berbanding terbalik dengan sektor perdagangan dan jasa yang mampu berkontribusi 27% pada PDRB dengan hanya menggunakan 1% saja dari total luas lahan yang ada di Kota Serang. Jika dilihat dari aspek perencanaan pada sektor pertanian telah dilakukan dengan baik dimana pemerintah telah merancang sembilan program pertanian dari mulai pemberdayaan petani sampai dengan pemasaran hasil tani. Total pagu anggaran yang diperkirakan mencapai Rp.45.627.489.000 dengan target pertumbuhan 1,2% (RPJMD Kota Serang tahun 2014-2018). Namun demikian berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh tim peneliti dari FISIP UNTIRTA pada tahun 2018. Pertanian termasuk 20 sektor dengan kepuasan terendah yaitu pada angka 2,42.

Kontradiksi antara hasil dan perencanaan diatas cukup menarik untuk diteliti apakah penyebab ketidaksesuaian antara keduanya. Sedangkan pada RPJPD Kota Serang pada tahun 2008-2025 Sektor Pertanian memang sudah tidak masuk prioritas pembangunan yang termaktub dalam Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk mendayagunakan potensi wilayah secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ragam potensi wilayah yang berbasis sumberdaya alam pada satu sisi, masih perlu dikembangkan mengingat kondisi eksisting sebagian masyarakat yang masih menggantungkan penghidupannya pada sektor primer. Di sisi lain juga kebijakan

yang tepat dan efektif dalam mengembangkan sektor sekunder juga perlu terus dikaji dan dikembangkan mengingat kondisi eksisting sebagian masyarakat lainnya yang telah bertransformasi dari sektor primer ke sektor sekunder.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014-2017

No	Mata Pencarian	2014		2015		2016		2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pegawai Pemerintah	19,770	9.45	21,409	10.46	17,586	8.69	17,822	8.75
2	Petani	5,797	2.77	5,454	2.66	4,774	2.36	4,543	2.23
3	Nelayan	1,065	0.51	1,091	0.53	1,104	0.55	1,139	0.56
4	Tenaga Pendidik	2,007	0.96	2,452	1.20	2,741	1.35	3,000	1.47
5	Tenaga Kesehatan	405	0.19	803	0.39	918	0.45	1,110	0.54
6	Peneliti	4	0.00	4	0.00	5	0.00	5	0.00
7	Jasa/Perdagangan	69,322	33.13	70,449	34.42	68,216	33.72	67,054	32.92
8	Karyawan Swasta	39,064	18.67	42,104	20.57	43,728	21.61	46,075	22.62
9	Lainnya	71,833	34.33	60,909	29.76	63,256	31.26	62,939	30.90
	JUMLAH	209,267	100	204,675	100	202,328	100	203,687	100

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2018

Data diatas menginformasikan bahwa penduduk Kota Serang memang sudah bertransformasi ke masyarakat modern dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak bekerja di sektor sekunder dan tersier dibandingkan sektor primer. Namun jika diamati lebih mendalam jumlah pekerja di Kota Serang 203.687 sangatlah jauh dari total penduduk Kota Serang saat ini yang telah menyentuh angka 666.6000 jiwa dengan angka pengangguran terbuka 8,23 yang lebih tinggi dari TPT Provinsi Banten yang merupakan TPT tertinggi di Indonesia, Kota Serang telah berkontribusi lebih dalam menyumbang angka pengangguran terbuka

di Provinsi Banten bahkan nasional. Jika diamati kembali jumlah petani di Kota Serang tiap tahunnya selalu menurun dari 5,797 ditahun 2014 menjadi 4,543 ditahun 2017 artinya kota serang telah kehilangan 1000 lebih petani dalam kurang lima tahun terakhir. Sementara jumlah pedagang pun sama mengalami penurunan dai 69,322 ditahun 2014 menjadi 67,054 ditahun 2017 ini artinya tidak terjadi tranformasi yang baik dari sektor pertanian ke perdagangan, boleh jadi tranformasi ke sektor lain namun angkanya pun tidak signifikan. Dengan demikian angka pengangguran 8,23 pun menjadi logis dalam kasus tidak berjalannya transisi masyarakat yang bekerja di sektor primer ke sektor sekunder.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Kota Serang berusia 10 Tahun ke atas sebagian besar komposisinya terdiri dari yang tidak/belum tamat sd/mi/ sederajat (30,3 %) dan tamat sd/mi/ sederajat (32,7 %). Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat	32,01
2	Tamat SD/MI/Sederajat	29,95
3	Tamat SMP/Sederajat	12,80
4	SMA/SMK/Sederajat	19,17
5	Universitas	6,07
Jumlah		100

Sumber: Disdukcapil Kota Serang Tahun 2018

Dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat di Kota Serang didominasi oleh penduduk yang hanya tamat sekolah dasar bahkan tidak tamat sama sekali. Fakta ini cukup menjadi jawaban bahwa kegagalan masyarakat Kota Serang dalam beradaptasi dari struktur tradisional ke struktur modern salah satunya didasari oleh tingkat pendidikan masyarakatnya.

Kedua, kentalnya unsur politis dalam visi para calon kepala daerah. Salah satu masukan (input) paling utama dalam penentuan arah kebijakan (Visi RPJMD) adalah visi kepala daerah terpilih. Visi tersebut kemudian dielaborasi dengan rancangan teknokratis RPJMD sebelum menjadi visi RPJMD yang sebenarnya untuk di capai dalam lima tahun kedepan. Bahkan sejatinya RPJMD merupakan operasionalisasi dari janji-janji politis yang mereka tawarkan kepada masyarakat pada saat masa kampanye. Namun masih terjadi permasalahan dalam membuat visi calon kepala daerah yaitu para pasangan calon kepala daerah (paslonkada) seringkali membuat visi-misi yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 42 ayat (1) disebutkan, persyaratan pencalonan dalam pilkada serentak menyertakan naskah visi, misi dan program pasangan calon yang mengacu pada RPJP Daerah yang ditandatangani pasangan calon. Ketentuan ini menjadi dasar dalam penyusunan naskah oleh pasangan calon saat mendaftarkan pencalonan ke KPU

Di kutip dari *Sindonews.com*, Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz menjelaskan, ketentuan RPJP Daerah didasarkan pada empat aspek. Pertama, gambaran tentang kondisi demografi dan penjelasan permasalahan sosial

yang dihadapi di tingkat lokal. Kedua, pemenuhan terhadap empat elemen peningkatan kualitas daerah yaitu ekonomi, politik/sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan. Ketiga, prediksi pencapaian keberhasilan dari program yang dilaksanakan dengan jangka waktu yang ditentukan. Keempat, keberpihakan terhadap perempuan dan disabilitas dalam naskah visi, misi dan program tersebut

Menurutnya, dari 158 paslon di 82 daerah pilkada, hanya 46 pasangan calon atau 29 persen yang mengawali visi misi dan programnya dengan penjelasan kondisi demografi dalam dokumennya. Sementara, 112 paslon atau 71 persen naskah visi misi tidak memuat penjelasan tentang kondisi demografi secara utuh. Kemudian, hanya 49 paslon atau 30 persen yang menjelaskan permasalahan sosial yang sedang dihadapi oleh daerah tersebut, sementara 109 paslon atau 69 persen naskah visi misi tidak memuat permasalahan sosial daerah yang dihadapi. Hal itu diperoleh setelah mempelajari 158 dokumen visi misi dan program paslon di 82 daerah pilkada yang diunduh dari laman resmi KPU pada Pilkada serentak 2015. (nasional.sindonews.com/ september 2015).

Hal yang sama juga terjadi di Kota Serang. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Serang telah melaksanakan Pemilihan walikota dan wakil walikota pada juli 2018. Jika melihat dari visi masing-masing calo sebagai berikut :

Gambar 1.2
Visi Calon Walikota Serang



Sumber : KPU Kota serang

Dapat dilihat bahwa visi para calon Walikota Serang tidak mengacu pada RPJPD Kota Serang yaitu “Terdepan sebagai kota pendidikan, Jasa dan Perdagangan Menuju Kota Serang SMART 2025” . visi yang dibuat para calon hanya berupa selogan *Cantik, Bercahaya, dan Aje Kendor*. Yang dibuat untuk menarik para pemilih pada pemilihan Walikota Kota Serang 2018.

Kasus diatas memberikan gambaran tentang lemahnya sumber penentuan arah kebijakan ditingkat daerah. Padahal visi misi kepala daerah terpilih akan menjadi dasar pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD yang kemudian memuat rencana-rencana pemerintah daerah dalam mengisi pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun.

Ketiga, tidak adanya analisis ilmiah tentang kondisi umum daerah dan lemahnya rujukan dalam penentuan arah kebijakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat tentang kondisi pembangunan pada suatu daerah, sebaiknya dilakukan analisis kondisi umum daerah yang menggunakan indeks atau koefisien sederhana yang mudah dipahami secara umum. Analisis ini sangat

penting artinya untuk mengetahui secara jelas kondisi obyektif yang terdapat pada suatu daerah yang kemudian dijadikan landasan utama untuk menyusun rencana pembangunan secara realistis. Adalah sesuatu yang tidak realistis dan berbahaya bila suatu perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada kondisi riil yang terdapat pada daerah yang bersangkutan. Setelah diselidiki Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Serang ternyata tidak terdapat analisis ilmiah tentang kondisi umum Kota Serang pada BAB II RPJMD tahun 2014-2019. Hal ini menyebabkan penentuan strategi dan arah kebijakan cenderung diambil secara subyektif. Karena kondisi umum dan potensi dalam bab II RPJMD Kota Serang data-data yang ditampilkan adalah data kualitatif. Tidak ada analisis potensi secara kuantitatif yang menggambarkan kondisi umum yang dapat menjadi dasar penentuan isu-isu prioritas pembangunan yang ada di Kota Serang.

Maka peneliti menyimpulkan dibutuhkan alat analisis yang dapat memberikan jawaban akan permasalahan tersebut. Analisis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang rasional dan ilmiah. Analisis *Location Quotient* dapat menjadi pilihan permasalahan diatas. Analisis LQ digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya peranan sektor perekonomian suatu region dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial yang menjadi unggulan yang dapat dikembangkan pada suatu wilayah dan dipergunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) suatu wilayah. Sehingga penentuan kebijakan dan daya saing dapat terlihat dengan jelas dan

peluang tersebut dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Identifikasi masalah diatas mempertegas perlunya analisis kebijakan arah pembangunan di Kota Serang. Analisis yang dapat memberikan gambaran umum dan dapat dijadikan landasan untuk perumusan strategi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dengan harapan ketika perencanaan teknokratis dapat dirumuskan secara baik, akan mereduksi unsur politis yang kurang baik dari perencanaan jangka menengah yang secara langsung terintervensi dari visi misi kepala daerah terpilih. Dalam ranah strategi analisis SWOT juga dapat menjadi salah satu pilihan. Analisis SWOT senantiasa digunakan daerah-daerah lain di Indonesia dalam menentukan jenis Strategi apa yang cocok diterapkan di daerah yang bersangkutan.

1.2 Identifikasi Masalah

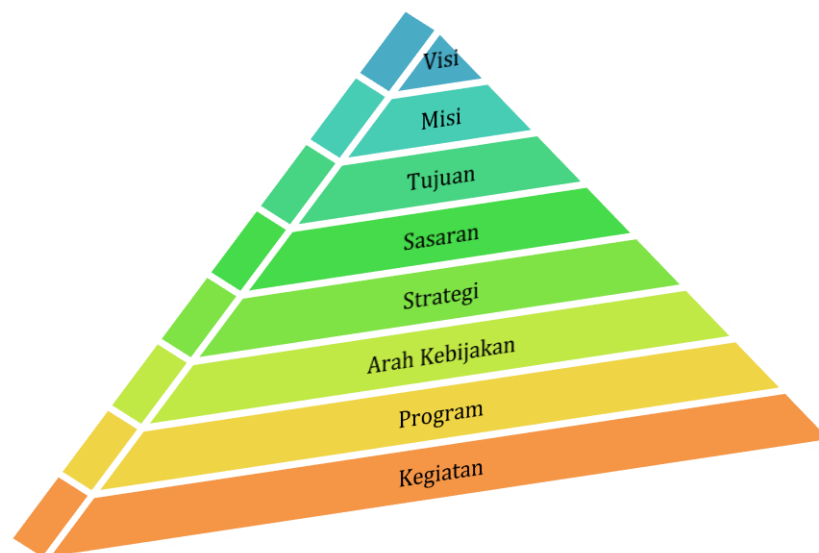
1. Belum tercapainya Visi RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2019 sebagai Kota Pendidikan.
2. Kentalnya unsur politis dalam Visi para calon kepala daerah.
3. Tidak adanya analisis ilmiah tentang kondisi umum daerah dan lemahnya rujukan dalam penentuan arah kebijakan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup studi dari penelitian itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, maka peneliti membatasi ruang lingkup studi tentang **“Analisis Strategi Arah Kebijakan pembangunan Kota**

Serang berdasarkan analisis SWOT dan LQ” analisis LQ menggunakan data seluruh sektor yang dikomparasikan dengan data di tingkat provinsi sehingga penelitian ini bersifat Makro.

Gambar 1.3
Tahapan Oprasionalisasi Visi RPJMD



Sumber : RPJMD Kota Serang

Gambar 1.3 menunjukkan tingkat oprasionalisasi Visi RPJMD yang mengasumsikan semakin rendah tingkatnya maka akan semakin teknis oprasionalisasinya. Semakin tinggi maka semakin idealis. Maka posisi strategi dan arah kebijakan adalah ditengah bagan tersebut dengan demikian penelitian ini tidak sampai pada ranah teknis seperti program dan kegiatan yang biasa dirancang lebih lanjut pada tingkat OPD.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu keadaan dimana tidak sesuai cita-cita, harapan dan keinginan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang

dapat menyebabkan adanya kesangsian, tantangan dan ketidakpuasan. Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Apa saja kah yang menjadi sektor dan strategi arah kebijakan pembangunan Kota Serang dengan metode SWOT dan LQ ?”**

1.5 Tujuan penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah di Kota Serang”

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya berkenaan dengan kebijakan publik dalam bidang Perencanaan pembangunan.

- **Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan

dan pengalaman di bidang penelitian, terutama dalam bentuk pengumpulan data maupun pengujian data secara ilmiah.

2. Bagi instansi terkait, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terkait pengambilan keputusan publik atau kebijakan publik di Kota Serang
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna juga menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap objek penelitian yang sama

. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kebijakan Publik

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Banyak sekali definisi mengenai kebijakn publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik baik kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye dalam Agustino (2016:2), *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Untuk itu James Anderson dalam Nugroho mengerucutkan kajiannya (1970:17) *“Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials”* (Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Berfokus pada tindakan yang diambil pemerintah.

Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat). Sedangkan menurut David Easton, “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Lima Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah:

- a. bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

e. bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pada hakikatnya kebijakan publik di buat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan Publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tujuan kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai “*authorities in apolitical system*” yaitu penguasa dalam suatu system politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

- a. segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
- b. kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.
- c. kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Mengacu pada pandangan dan pengertian-pengertian dari beberapa pakar kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda (*Agenda Setting*) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan

dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan

kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbolsymbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Dunn(2003), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagaiaktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.1.1 Analisis Kebijakan Publik

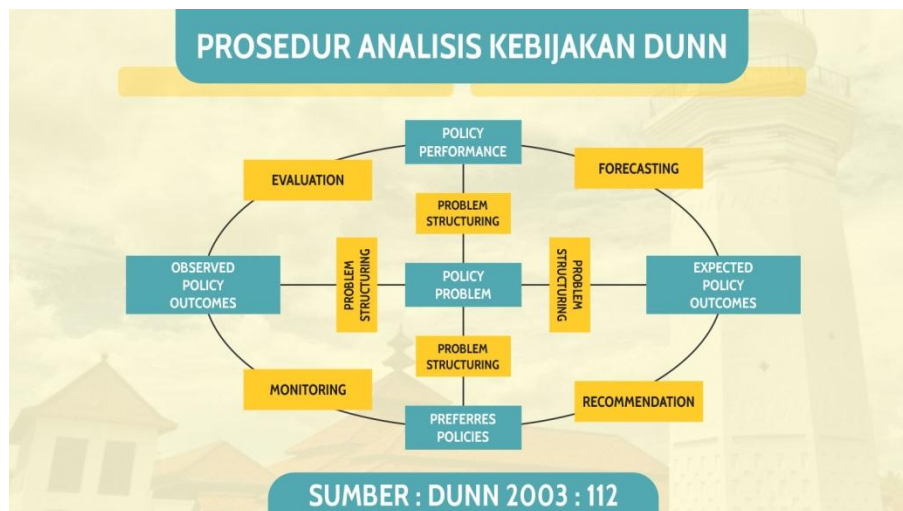
Menurut William N Dunn Analisis kebijakan ialah Disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan serta memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan publik meminjam tidak hanya ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan ini diharapkan mampu untuk menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai: 1) Nilai yang merupakan sebagai tolak ukur masalah teratasi, 2) fakta yang dimana sebagai

pembatas atau meningkatkan nilai, 3) tindakan yang penerapannya menghasilkan nilai, untuk menghasilkan ketiga hal tersebut seorang analis dapat memakai satu atau lebih pendekatan yang ada antara lain : empiris, valuatif, dan normatif.

Pendekatan Empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Pendekatan ini menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif. Pendekatan Evaluatif sendiri ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan, pada pendekatan ini perkembangan disiplin ilmu inilah yang sering menjadi akibat dari penelitian terapan ketimbang sebagai penyebabnya. Pendekatan Normatif ditekankan pada rekomendasi tindakan, menghasilkan informasi yang bersifat preskriptif serta memiliki hasil rekomendasi terhadap kebijakan apa yg sebaiknya diadopsi untuk masalah publik.

(Gambar 2.1)



Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (*policy-informational-components*) yang ditransformasikan dari satu ke yang lainnya dengan menggunakan lima

prosedur analisis kebijakan (*policy-analytic-prosedures*) seperti kerangka kerja yang disajikan gambar diatas, kerangka kerja ini mensarikan ide-ide yang akan didiskusikan secara rinci dimasing-masing bagian. Untuk kemudian mentranformasikan informasi dari masing-masing bagian pada pusat masalah kebijakan. Lima prosedur analisis yang dimaksud adalah :

(Tabel 2.1)
Prosedur Analisis Kebijakan

No.	Prosedur	Hasil
1.	Perumusan masalah	Inti masalah
2.	Peramalan	Masa depan kebijakan
3.	Rekomendasi	Aksi kebijakan
4.	Pemantauan	Hasil-hasil kebijakan
5.	Evaluasi	Kinerja kebijakan

Sumber : Dunn (2003: 115)

1. Perumusan masalah

Analisis kebijakan melalui prosedur perumusan masalah bertujuan untuk menemukan inti masalah. Inti masalah sangat penting dalam penyelesaian masalah publik ataupun masalah kebijakan oleh karena itu prosedur perumusan masalah selalu dilakukan paling awal sebelum melakukan prosedur yang berikutnya.

Mengetahui apa yang menjadi permasalahan utama sangatlah penting dalam ilmu kebijakan, bahkan menjadi inti dalam ilmu analisis kebijakan. Hal ini terjadi karena umumnya kebijakan yang diambil oleh para pemangku kebijakan seringkali tidak tepat pada inti masalah sehingga

tidak menyelesaikan masalah malah menciptakan masalah baru. Karena kompleksitas dari permasalahan publik maka di perlukan metode untuk merumuskan permasalahan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan inti.

2. Peramalan

Peramalan (*forecasting*) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Ramalan mempunyai tiga bentuk utama: proyeksi, prediksi, dan perkiraan.

a. Suatu proyek adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. Tujuan yang paling penting adalah ramalan menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan dimasa depan dan konsekuensinya. Tujuan dari peramalan mirip dengan tujuan dari kebanyakan riset eksakta maupun sosial, sejauh kedua riset ini berusaha baik untuk memahami maupun untuk mengendalikan lingkungan manusia dan material. Sulitnya meramalkan masa depan kebijakan di bawah kondisi perubahan terus-menerus yang kompleks, cepat dan bahkan kacau.

b. Sebuah prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hukum teoretis, proposisi teoretis, atau analogi.

c. Suatu perkiraan (*conjecture*) adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Perkiraan dapat diperkuat dengan argumen dari pakar, metode dan kausalitas.

Metode peramalan teoretik membantu analis membuat prediksi tentang situasi masyarakat di masa depan atas dasar asumsi teoretik dari data masa lalu maupun masa kini. Berbeda dengan peramalan ekstrapolatif, yang menggunakan asumsi tentang berulangnya sejarah untuk membuat proyeksi, peramalan teoretik didasarkan pada asumsi tentang sebab dan akibat yang terkandung di dalam berbagai teori. Sementara logika dari peramalan ekstrapolatif itu pada umumnya induktif, logika dari peramalan teoretik pada umumnya deduktif. Daya persuasi suatu argumen deduktif akan meningkat jika prediksi yang dideduksikan secara teoretik dapat dijumpai dari waktu ke waktu melalui penelitian empirik.

Beberapa prosedur yang membantu analis membuat peramalan teoretik: pemetaan teori, pembuatan model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval, dan analisis korelasi. Namun tak satupun dari teknik-teknik ini yang benar-benar membuat prediksi; hanya teori yang dapat membuat prediksi. Dikatakan oleh seorang kontributor kunci dalam bidang pembuatan model teori:

Menerima sifat yang melekat didalam metode ilmiah, dijumpai adanya kesenjangan antara bahasa teori dan penelitian. Inferensi kausal berada di dalam tataran teori, sementara penelitian aktual hanya dapat menetapkan kovariansi dan

urut-urutan temporal. Akibatnya, kita tidak akan pernah dapat membuktikan hukum-hukum kausal secara empirik. (Dunn, 2000:338)

3. Rekomendasi

Prosedur analisis-kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan informasi tentang kemungkinan serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Untuk merekomendasikan suatu tindakan kebijakan khusus diperlukan adanya informasi tentang konsekuensi-konsekuensi di masa depan setelah dilakukannya berbagai alternatif tindakan. Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi terkait erat dengan persoalan etika dan moral

Rekomendasi kebijakan memerlukan pendekatan yang normatif, tidak hanya empiris atau evaluatif, karena persoalannya adalah aksi mana yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan tentang aksi meminta analisis memilih di antara berbagai pernyataan advokatif tentang apa yang seharusnya dilakukan.

Perspektif mengenai isu pilihan rasional adalah apa yang diberikan oleh sosiolog Amitai Etzioni. Etzioni telah menawarkan suatu strategi penelusuran campuran (*mixed scanning*) sebagai alternatif dari pandangan rasionalitas komprehensif dan pandangan-pandangan lain yang berlawanan, termasuk inkrementalis yang terputus-putus (*disjointed incrementalism*) dan rasionalis yang terkungkung. Etzioni dan kawan-kawan memberikan kritik kepada keputusan rasional-komprehensif, juga menunjukkan keterbatasan dari teori inkremental. Inkrementalis, misalnya, memiliki orientasi yang konservatif dan status quo

sehingga sulit untuk menerima perlunya kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan. Inkrementalisme juga berpandangan bahwa bahwa kebanyakan pilihan kebijakan akan dibuat oleh kepentingan-kepentingan yang paling berkuasa di dalam masyarakat.

Penelusuran campuran menyediakan cara memilih yang didasarkan pada pendekatan rasional-komprehensif maupun inkrementalisme terputus-putus. Semakin strategis masalah semakin rasional-komprehensiflah pendekatan yang memadai untuknya. Sebaliknya, semakin operasional masalahnya, semakin tepat digunakan pendekatan inkrementalisme terputus-putus. Masalahnya adalah bagaimana mengkombinasikan keduanya secara efektif.

4. Monitoring

memantau kebijakan publik, dan isu apapun, kita membutuhkan informasi yang relevan, reliabel dan valid. Apabila informasi tidak tersedia pada instansi-instansi pemerintah maka pemantauan perlu dilakukan dengan kuesioner, wawancara, observasi lapangan dan arsip kantor.

Dalam memantau hasil kebijakan kita harus membedakan dua jenis akibat: keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah-laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Untuk menghitung secara baik keluaran dan dampak kebijakan, perlu melihat kembali tindakan kebijakan yang dilakukan sebelumnya. Secara umum, tindakan kebijakan mempunyai dua tujuan utama: regulasi dan alokasi. Tindakan regulatif adalah

tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu. Sedangkan tindakan alokatif adalah tindakan yang membutuhkan masukan yang berupa uang, waktu, personil dan alat.

Keberhasilan dalam memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang hasil kebijakan tergantung pada kapasitas kita dalam membangun ukuran-ukuran yang reliabel dan valid. Salah satu cara untuk itu adalah dengan merinci secara tegas variabel yang akan kita monitor. Variabel adalah karakteristik dari seseorang, suatu peristiwa atau obyek, yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda, sedangkan konstan adalah karakteristik yang tidak berubah-ubah. Sifat dari pendekatan pemantauan kebijakan yaitu: pertama, berusaha memantau hasil kebijakan yang relevan; kedua, setiap pendekatan pemantauan adalah terfokus pada tujuan; ketiga berorientasi pada perubahan (*change-oriented*); keempat, pendekatan pemantauan memungkinkan klasifikasi silang atas keluaran dan dampak dengan variabel lain, termasuk variabel yang dipakai untuk memantau masukan serta proses kebijakan; terakhir, setiap pendekatan mengukur tindakan dan hasil kebijakan secara obyektif maupun subyektif.

Semua sifat di atas pada akhirnya membantu kita untuk memahami pemantauan sebagai: proses memperoleh informasi yang relevan dengan kebijakan, untuk mengukur perubahan yang terjadi didalam kondisi sosial yang terfokus pada tujuan, baik informasi obyektif maupun subyektif, di antara berbagai kelompok sasaran dan kelompok yang diuntungkan.

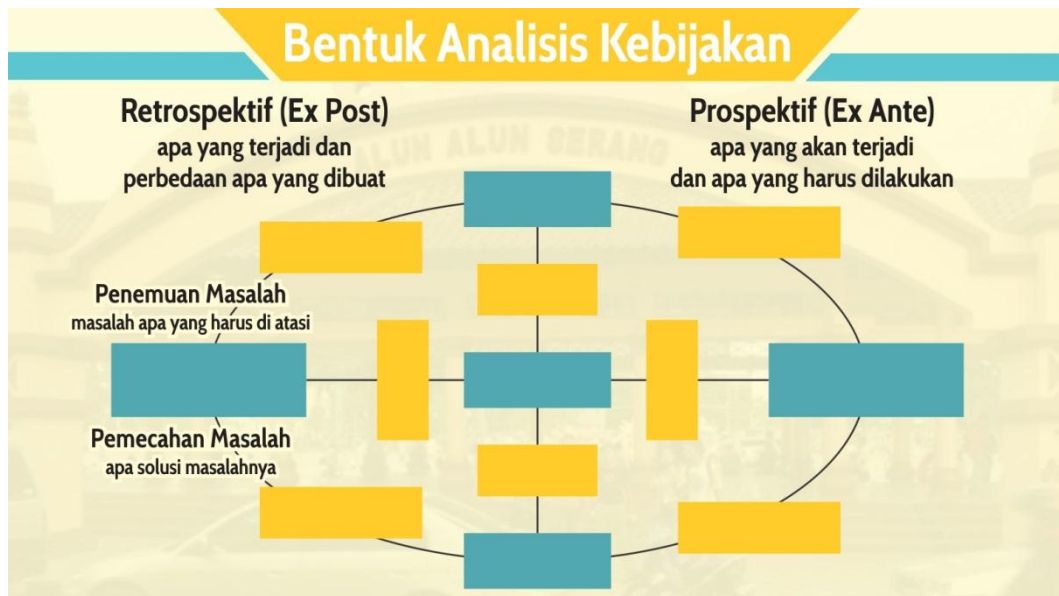
5. Evaluasi

evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, hasil-hasil evaluasi dimaksud akan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali.

Selanjutnya Dunn (2000:608) menulis bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan atau program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Proses analisis kebijakan diatas dapat di oprasikan melalui dua Bentuk Analisis Kebijakan. *Pertama*, Bentuk Ex-post atau Analisis Retrosif yaitu melihat kebelakang sejauhmana kinerja kibijakan berjalan dan mengevaluasi. Kedua Ex-Ante yaitu analisis Progresif yang melihat kedepan bagaimana masa depan kebijaka dan merekomendasikannya.

(Gambar 2.2)



Sumber :Dunn (2003:107)

1. Analisis Kebijakan Retrospektif (*ex-post*)

Analisis ex post dilakukan setelah aksi kebijakan apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat. Ex post cenderung melihat kembali sejauhmana Aksi kebijakan itu bekerja dan bagaimana kinerja kebijakan mencapai tujuannya. Dari lima prosedur analisis ex post hanya menggunakan tiga prosedur yaitu perumusan masalah, monitoring dan evaluasi.

2. Analisis Kebijakan Prospektif (*ex-Ante*)

Analisis ex-ante merupakan produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan. Analisis ex ante cenderung mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif kebijakan dan sebagai landasan untuk membuat keputusan kebijakan. perumusan masalah tetap dipakai sebagai prosedur yang

paling awal di ikuti dengan dua prosedur sisanya yaitu peramalan dan rekomendasi.

Secara teori terdapat satu lagi bentuk analisis kebijakan yaitu analisis kebijakan terintegrasi. bentuk ini merupakan bagian utuh dari analisis kebijakan publik yang dilakukan terus-menerus tanpa henti (*unstopped analysis*). Oleh karena itu bentuk ini kurang cocok digunakan untuk penelitian akademik dan lebih cocok kepada penelitian praktis.

2.1.2 Konsep Perencanaan Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila

pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat: 2011:3)

Dengan sistem desentralisasi yang dianut oleh orientasi pembangunan di Indonesia saat ini maka pembangunan daerah juga menjadi bagian utama dalam konsep pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Supriyadi (2004:5) didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam waktu tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (*sense of ownership*) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Keterlibatan *stakeholder* yang merupakan aktor kebijakan merupakan bukti bahwa perencanaan pembangunan merupakan manifestasi dari kebijakan publik. Dalam perspektif pembangunan daerah, tahap-tahap dalam proses

kebijakan publik diwujudkan dalam tahapan perencanaan program/kegiatan, implementasi program/kegiatan, dan evaluasi program/kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sebuah kebijakan publik tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses kebijakan publik. Menurut Santoso (2008:41) Paling tidak terdapat dua tahapan dalam proses yang kadang ditemui kendala dan permasalahan yakni :Pertama, bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah dijabarkan dalam program kegiatan. Kedua, kendala dan permasalahan implementasi program kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi antara perencanaan dengan implementasi-nya. Kendala dan permasalahan tersebut diatas tidak terlepas dari bagaimana proses kebijakan publik dirumuskan dengan keterlibatan banyak pihak sesuai dengan kapasitas dan kepentingan masing-masing pihak.

2.1.2.1 Perencanaan Pembangunan Era Otonomi Daerah

Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan kemandirian Daerah , maka sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan di revisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan semakin kuatnya komitmen dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada daerah dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Pembagian kewenangan sesuai dengan amanah UU no 23 tahun 2014 mengintrusikan adanya pembangunan yang saling terintegrasi, terarah dan berkelanjutan di indonesia. Dengan demikian permasalahan pembangunan akan lebih terorganisir dan terselesaikan secara efektif dan efisien.

Namun pada kenyataannya, selama berlangsungnya perencanaan pembangunan di era otonomi daerah sampai saat ini masih terjadi permasalahan-

permasalahan perencanaan pembangunan atau yang biasa disebut patologi (*penyakit*) perencanaan. Permasalahan yang masih sangat dirasakan adanya “ego sektoral” antara pejabat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan yang dibuat cenderung subyektif hanya melihat dari kacamata pejabat (*elite*) sehingga perencanaan yang dibuat masih bersifat “Top-down Planing”. Akibatnya, kebanyakan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat.

2.1.2.2 RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Pemerintah (Daerah) sebagai penyelenggara pembangunan dan sekaligus abdi masyarakat, harus dapat merencanakan pembangunan, kini dan di masa yang akan datang. Sehingga untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien dan berkeadilan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis diperlukan suatu dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sesuai dengan amanah Pasal 3 dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan (2006-2010), yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan UUNo. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih melalui Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJM Daerah juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda.

Selain itu, RPJM juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah; (2)

statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah.

Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah juga dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja kepala daerah, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, seyogianya pola penulisan dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak harus mengikuti pola tertentu (seragam), tetapi dapat berbeda satu sama lainnya, hal yang penting dalam hal ini adalah seberapa jauh dokumen perencanaan tersebut bersifat operasional dan bermanfaat untuk mengarahkan para pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga sasaran yang diinginkan dapat

terwujud. Variasi penulisan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimungkinkan mengingat Indonesia dewasa ini sudah berada dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan di mana pemerintah daerah dapat menentukan sendiri apa yang baik untuk daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi daerah bersangkutan. Pola penulisan rencana pembangunan daerah tersebut secara ringkas dapat dilihat dari daftar isi pada masing-masing dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Secara umum dewasa ini terdapat dua pola penulisan RPJMD yang berlaku di Indonesia, pertama adalah mengikuti pola Bappenas yang dapat dilihat dari buku RPJM Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 yang telah diterbitkan sebelumnya secara resmi. Pola ini didasarkan pada amanat UU No 25 tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa penyusun RPJMD harus mengacu pada RPJMN. Kedua adalah mengikuti pola penulisan sebagaimana ditetapkan dalam surat edaran (SE) Mendagri No.050/2005 SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP daerah dan RPJM daerah yang kemudian dikuatkan dalam bentuk Permendagri 54 tahun 2010.

Kedua pola penulisan RPJM ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga sulit mengatakan bahwa pola yang satu lebih baik dari yang lainnya. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana dalam menyusun RPJMD ada daerah yang menggunakan pola Bappenas dan ada pula yang menggunakan Permendagri. Namun demikian, sejak keluarnya Permendagri 54, tahun 2010, umumnya pemerintah daerah Indonesia menggunakan pola penulisan sesuai dengan arahan Depdagri tersebut terlebih peraturan ini telah diperbaharui

dengan tebitnya Permendagri no 86 tahun 2017. Perbedaan dalam menyusun penulisan RPJMD antara pola Bappenas dengan Depdagri ternyata cukup besar dan bersifat prinsipil. Perbedaan ini terlihat pada kerangka penulisan (daftar isi) dari dokumen perencanaan pembangunan daerah bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian “Analisis Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang tahun 2019-2024”. Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa jurnal, skripsi maupun tesis yang terkait dengan tema yang diambil dalam penelitian ini. Peneliti mengambil dua penelitian terdahulu yang bertujuan sebagai pembandingan dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian pertama yaitu diambil dari Jurnal yang berjudul “Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Dan Strategi Pengembangannya : Studi Kasus Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2014” yang dilakukan oleh Yufiyullah Mubbaok, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2015. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan beberapa metode analisis menghasilkan rekomendasi strategi pembangunan meningkatkan perekonomian daerah melalui potensi sektor basis, meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Analisis yang dilakukan dengan membandingkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2010 dan PDRB Atas Dasar

Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010. Model analisis yang digunakan adalah analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), analisis *Shift Share*, analisis *Location Quotient*, analisis *Overlay*, analisis *Klassen Typology* dan analisis SWOT.

Persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu penulis melakukan penelitian dengan objek utama yang sama yaitu strategi pemerintah berdasarkan sektor basis. Dengan melihat objek yang sama maka peneliti dapat menjadi lebih memahami bagaimana strategi pemerintah berdasarkan sektor basis. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah fokus yang dipilih penelitian terdahulu yaitu Ekonomi sedangkan penulis adalah Arah Kebijakan. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda, jika penelitian terdahulu meneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan metode campuran dan selain itu lokus yang diambil juga berbeda jika penelitian terdahulu di Kabupaten Ogan Komering Ulu sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Serang.

“Analisis arah Kebijakan Ekonomi Terhadap sektor Pendidikan dalam peningkatan IPM”, yang dilakukan oleh Yusuf Hasbullah, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2012. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi meningkat 12,11% di mana sektor pertambangan dan penggalian memiliki tingkat tertinggi sebesar 28,17%. Sementara itu, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 6,29% dan pada tahun 2012 mencapai 99,49%, untuk SMP / MTS 87,97% untuk SMA / MA 49,35%. APK SD / MI untuk tahun 2012 adalah 1.114,91% untuk SMP / MTS 100,20% dan untuk

SMA / MA 77,29% tingkat APS SD / MI tahun 2014 menurun menjadi 0,34%, tingkat SMP / M.TS itu 1,45% dan tingkat SMA / MA menurun secara total 2,18%, AMH tahun 2012 menurun menjadi 96,70%. AMS tingkat SD / MI tahun 2011 di total adalah 87.785 orang, tingkat SMP / M.TS total adalah 73.610 orang dan tingkat SMA adalah 191.411 orang.

Persamaan penelitian ini dengan penulis, yaitu penulis melakukan penelitian dengan objek utama yang sama yaitu analisis arah kebijakan pemerintah . Dengan melihat objek yang sama maka peneliti dapat menjadi lebih memahami bagaimana menganalisis arah kebijakan pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah fokus yang dipilih penelitian terdahulu yaitu Analisis kebijakan Ekonomi dalam hal ini berfokus pada sektor Pendidikan, tetapi penelitian yang penulis lakukan saat ini menganalisis secara umum arah kebijakan pemerintah. Selain itu Teori dasar yang digunakan juga berbeda, jika penelitian terdahulu meneliti menggunakan *Teori Index Pembangunan Manusia* sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan Koefisien Lokasi dan analisis SWOT kendati masih dalam topik yang sama yaitu Perencanaan pembangunan. dan selain itu lokus yang diambil juga berbeda jika penelitian terdahulu di Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Serang.

Rujukan penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 2017 dengan judul *Kajian Potensi Unggulan Kota Serang*. Kajian ini dimaksudkan dalam rangka mengidentifikasi potensi unggulan Kota Serang berdasarkan pendekatan 17 (tujuhbelas) sektor sebagaimana digunakan

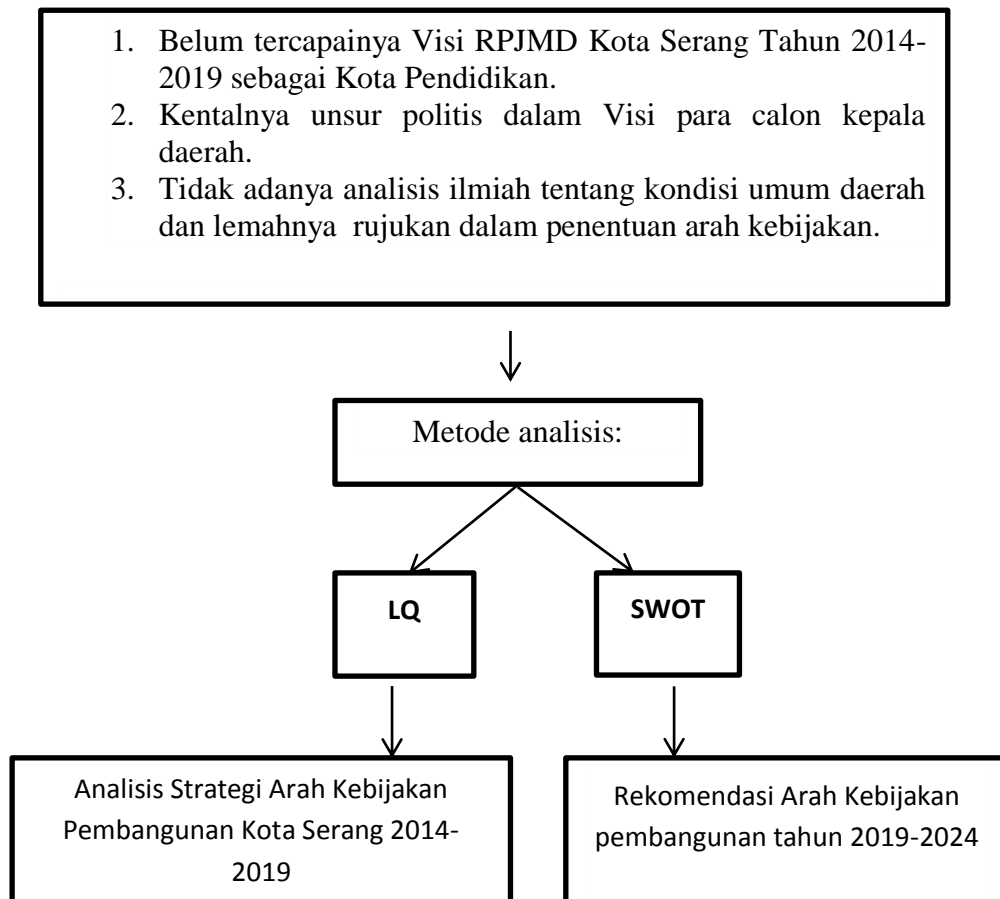
secara resmi oleh pemerintah.. Dari penelitian ini diketahui bahwa diketahui ada enam sektor unggulan di Kota Serang dalam lingkup daerah tingkat II dan diketahui pula sektor unggulan di masing-masing kecamatan di Kota Serang.

Terdapat banyak persamaan dalam penelitian ini, diantaranya alat analisis utama yang digunakan yaitu LQ dan lokasi penelitian yang sama di Kota Serang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus kajian yang berbeda yaitu penelitian ini mengarah pada permasalahan perencanaan pembangunan jangka menengah sementara penelitian oleh tim Peneliti FISIP UNTIRTA berfokus pada sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah untuk menarik investasi. Selain dari pada itu penelitian ini adalah penelitian akademis dan yang lainnya adalah penelitian praktis.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Dan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti. Sementara Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012:65) mengemukakan bahwa “Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Berikut ini adalah kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian:

Gambar 2.3
Proses Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian Analisis Kebijakan Arah Pembangunan Kota Serang peneliti menggunakan Metode *Mixed Method*, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Metode ini dipilih karena Peneliti ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif yang dapat dicari dengan metode kuantitatif dan kualitatif dalam waktu yang sama.

Metode campuran adalah suatu metode penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam satu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan obyektif. (Creswell 2010: 22). Diperjelas lagi oleh Tashakkori dan Teddi dalam buku yang sama, bahwa mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif ini muncul setelah adanya debat yang berkepanjangan antara dua paradigma yang menjadi pedoman dari peneliti, kedua paradigma tersebut adalah positivis/empiris yang menjadi dasar konseptual dari metode kuantitatif dan paradigma konstruktivis/fenomenologi yang menjadi dasar dari metode kualitatif (2010: 3-4).

Jenis desain penelitian pada penelitian *mixed methods* dibagi menjadi tiga yaitu *sequential explanatory designs*, *sequential exploratory designs*, dan *concurrent triangulation designs*. Pertama, *sequential explanatory designs*,

pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan dalam dua tahap, dengan penekanan utama pada metode kuantitatif. Kedua, *sequential exploratory designs* yaitu pengumpulan data kualitatif dilakukan pertama kali dan dianalisis, kemudian data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis. Jenis *sequential exploratory* lebih menekankan pada kualitatif. Ketiga adalah *concurrent triangulation designs* (juga disebut desain *integrative* atau konvergen) di mana peneliti secara bersamaan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan dalam analisis metode analisis data kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian menafsirkan hasilnya bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena yang menarik.

Penelitian ini mengambil pendekatan *sequential explanatory designs* dengan penekanan utama pada metode kuantitatif. Data-data kuantitatif lebih dulu dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode analisis data, yang hasilnya kemudian coba dilengkapi dengan data kualitatif dengan tujuan untuk memperdalam analisis pada hasil penelitian.

3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian

Ruang lingkup/fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup digunakan sebagai batasan penelitian agar dapat fokus pada fokus penelitian yang akan dijalankan. Jadi dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus dengan penelitian yang akan dijalankan, yaitu mengenai “ Analisis Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang 2019-2024”.

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara terperinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi ruang lingkup penelitian ini adalah menjabarkan mengenai bagaimana Proses analisis arah kebijakan Kota Serang secara umum menggunakan metode LQ dan SWOT. Mengingat tidak adanya analisis ilmiah tentang kondisi umum daerah dan gambaran potensi daerah pada berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Serang tahun 2013-2018. Maka penelitian ini menawarkan evaluasi terhadap arah kebijakan menggunakan analisis ilmiah LQ dan SWOT yang kemudian dapat menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD tahun 2019-2024.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang. Kota Serang merupakan salah satu dari delapan daerah otonom yang ada di Provinsi Banten. Pemilihan Kota Serang sebagai lokasi penelitian telah disampaikan di latar belakang masalah.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan daerah pada dasarnya berisikan sasaran, fokus dan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan masing-masing agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan visi-misi kepala daerah bersangkutan. Dokumen arah kebijakan ini yang kemudian menjadi landasan utama untuk pemerintah daerah untuk pengambil kebijakan dan penetapan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Untuk dapat menjamin implementasi suatu rencana pembangunan daerah, tentunya perumusan arah kebijakan ini harus didasarkan pada kondisi umum dan keadan sosial budaya daerah setempat.

Dalam praktiknya sering terjadi kesalah pahaman tentang arah kebijakan daerah yang seringkali di artikan sebagai program dan kegiatan pembangunan (Kebijakan). Menurut Permendagri 86 tahun 2017 Arah kebijakan sebenarnya merupakan kondisi dan hasil yang diharapkan tercapai di masyarakat setempat. Sedangkan program kegiatan adalah berkaitan dengan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan pembangunan harus juga memperhatikan kondisi

sumber daya, baik dana dan tenaga kerja yang terampil serta kondisi sosial budaya di masyarakat.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian Analisis Arah Kebijakan Pemerintah Kota Serang menggunakan Prosedur analisis Kebijakan Dunn. Adapun dimensi dan indikatornya yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Dimensi	Teknik Analisis Data	Hasil
Analisis Kebijakan	Perumusan masalah	<i>Location Quotien</i>	Penemuan inti masalah masalah
	Evaluasi	<i>SWOT Analysis</i>	Penilaian kebijakan di masa lalu (RPJMD 2014-2019)
	Rekomendasi	Hasil intrerpretasi data dari penilaian para ahli	Aksi kebijakan (RPJMD 2019-2024)

3.5 Jenis data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian (fokus) atau dengan mengambil dari sumber lain yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Sementara Data Primer adalah data yang diambil langsung oleh subyek penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Data sekunder digunakan pada teknik analisis data LQ. Sementara data primer digunakan untuk kebutuhan analisis SWOT.

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai macam sumber yang diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari BPS Kota Serang, BPS Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sumber lain seperti internet dan studi kepustakaan. Sesuai dengan obyek penelitian Kota Serang maka penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang berdasarkan harga konstan tahun 2010 dari tahun 2014 – 2018. Data yang digunakan terbatas pada tujuh belas sektor yang ada dalam komponen PDRB dengan melakukan perbandingan terhadap PDRB di tingkat Provinsi Banten berdasarkan harga konstan 2010 dari tahun 2014 – 2018.

3.6 Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data yang dimiliki oleh obyek penelitian dari wilayah Kota Serang yang memiliki enam Kecamatan tentang arah kebijakan pembangunan. Sementara sampel merupakan bagian dari populasi atau sebagian dari karakteristik dari populasi yang dipilih untuk

merepresentasi populasi secara keseluruhan. Dengan demikian sample dalam penelitian ini adalah sebagian data tentang faktor-faktor penentu arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2014-2019. Data yang dimaksud adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator kesejahteraan sosial (IPM, LPE, Angka Kemiskinan, TPT) yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang.

Karena penelitian menggunakan metode campuran maka data sample yang telah diolah diuji dengan penilaian ahli yang telah ditentukan secara perposif sesuai dengan kapabilitasnya sebagai berikut :

Table 3.7
List Of Expert

No	Nama	Kapasitas
1	H. Syafruddin, M.Si	<i>Wali Kota terpilih Kota Serang</i>
2	<i>Ir. Djoko Sutrisno</i>	<i>Kepala BAPPEDA</i>
3	<i>Kevin Harinusa, MH</i>	<i>DPRD Kota Serang</i>
4	<i>Kandung S.N, M.Si</i>	<i>Ahli Perencanaan Pembangunan</i>
5	<i>Dr. Amas Tajudin</i>	<i>Ketua MUI</i>

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan – laporan tertulis baik berupa angka

maupun keterangan. Oleh karena itu, untuk kepentingan penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pada penelitian ini studi dokumentasi dipakai untuk mengetahui data PDRB Kota Serang dengan data tahun terkini atas dasar harga konstan, gambaran umum dan kondisi umum perekonomian Kota Serang yang bersumber dari dokumentasi BPS dan BAPPEDA Kota Serang serta data – data komoditas unggulan lainnya. Selain data – data laporan tertulis untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari sumber pustaka, media massa dan internet.

2. Studi Kepustakaan

Merupakan kajian tentang karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian untuk menghadirkan masukan teknokratis terhadap rumusan permasalahan. Dalam penelitian ini juga dimungkinkan merujuk beberapa pustaka untuk dipakai sumber datanya sebagai data primer, sekunder atau tersier.

3. Observasi

Menurut Sugiyono (2011:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala atau fenomena. Dalam penelitian ini digunakan pula

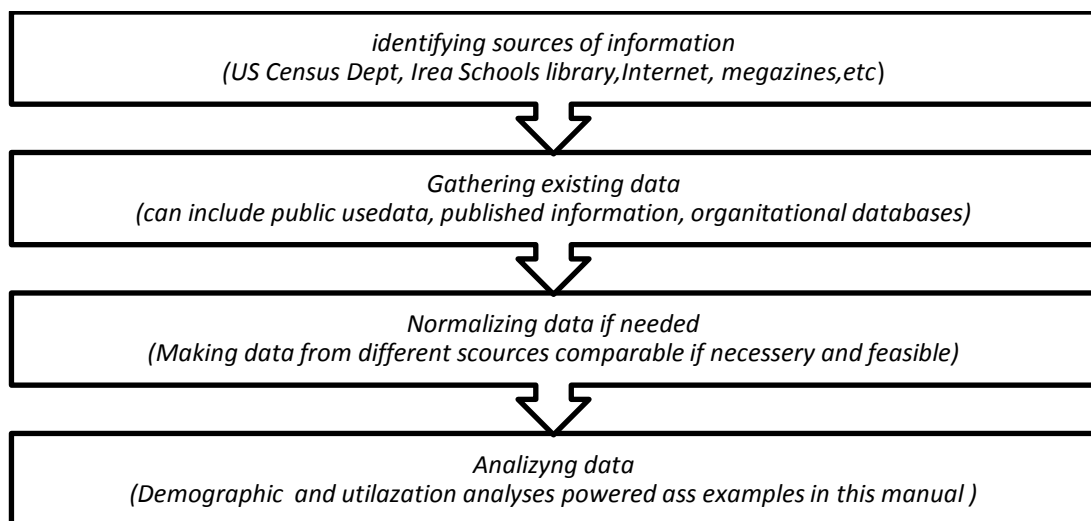
analisis SWOT yang akan melihat faktor-faktor atau gejala dari internal maupun eksternal. Maka dari itu penting untuk mengamatai fenomena apa atau gejala apa yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintah Kota Serang dalam hal kebijakan arah pembangunan.

3.7 Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Disain (rancangan) penelitian McCoston (2012:34) *“a step-by-step plan that guides data collection and analysis. In the case of secondary data reviews it might simply be an outline of what you want the final report to look like, a list of the types of data that you need to collect, and a preliminary list of data sources”* (langkah demi langkah rencana yang mengarahkan pengumpulan dan analisis data; dalam penelitian analisis data sekunder sederhananya merupakan kerangka kerja garis besar mengenai hasil akhir seperti apa yang ingin dilaporkan, daftar data yang dirasa perlu dikumpulkan, dan daftar sementara sumber data). Berikut adalah langkah penelitian analisis data sekunder ;

(Gambar 3.1)

Step Involved In Secondary Data



Jadi, dalam penelitian sekunder (analisis data sekunder) langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Menetapkan (mencari-temukan) sumber data/informasi (sekolah, universitas, Dinas Pendidikan, dsb);
2. Mengumpulkan data yang sudah tersedia (dalam “dokumen”);
3. Menormalisasikan data jika diperlukan dan memungkinkan (membuat data dari berbagai sumber sesetara mungkin “menjadi satu bentuk yang sama”);
4. Menganalisis data

Langkah ini yang akan diambil untuk menjawab pernyataan dalam indikator oprasional penelitian ini. Namun untuk memenuhi indikator tersebut dibutuhkan analisis yang secara spesifik menguak permasalahan pada setiap langkah analisis penelitian (perumusan masalah, monitoring, evaluasi, peramalan, rekomendasi). Berikut adalah metode-metode analisis yang digunakan :

1. *Location Quotient*

Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan atau potensi satu sektor untuk tumbuh berkembang di suatu daerah terhadap daerah yang satu tingkat lebih luas (Kota/kabupaten-Provinsi). Metode ini adalah metode utama yang ditempatkan pada perumusan masalah untuk menjawab sektor-sektor apa saja yang patut menjadi perhatian pemerintah Kota Serang untuk dijadikan arah tujuan kebijakan daerah.

Analisis LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan ekonomi sejenis pada lingkup yang lebih luas (regional atau nasional). Secara matematis rumus LQ sebagai berikut:

$$LQ_i = \frac{Si/Ni}{S/N} \quad \text{atau} \quad \frac{Si/S}{Ni/N}$$

- ❑ Si: PDRB per sektor di kab/kota "A"
- ❑ S: Jml seluruh sektor PDRB di kab/kota "A"
- ❑ Ni: PDRB per sektor di Provinsi "X"
- ❑ N: Jml seluruh sektor PDRB di Provinsi "X"

(Sumber: Syafrizal:128)

Hasil perhitungan *location quotient* dimaknai sebagai ukuran atau tingkat daya saing dan spesifikasi satu sektor terhadap sektor

lain di suatu daerah dengan daerah yang satu tingkat lebih luas (kota-provinsi). tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $LQ > 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor unggulan, artinya tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi. Artinya sektor tersebut layak menjadi tujuan arah kebijakan karena daya saingnya dengan daerah lain.
- b. Jika $LQ = 1$ maka tingkat spesialisasi kabupaten/kota samadengan di tingkat provinsi.
- c. Jika $LQ < 1$ maka sektor tersebut dikategorikan sektor non unggulan, artinya tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi. Artinya sektor tersebut *tidak* layak menjadi tujuan arah kebijakan karena daya saingnya dengan daerah lain.

2. Analisis *SWOT*

Menurut Rangkuti (2006), analisis *SWOT* adalah suatu identifikasi faktor strategis secara sistematis untuk merumuskan strategi. Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisa *SWOT* dipakai untuk mengevaluasi strategi pembangunan Kota Serang 2014-2019 untuk kemudian

menjadi masukan kembali pada arah kebijakan 2019-2024. Dari pengertian SWOT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Evaluasi faktor Internal

- a. Kekuatan (*strength*), yaitu kekuatan apa yang dimiliki Kota Serang. Dengan mengetahui kekuatan, Kota Serang dapat dikembangkan menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasar dan mampu bersaing untuk menghadapi tantangan pembangunan
- b. Kelemahan (*weakness*), yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi Kota Serang.

2. Evaluasi Faktor Eksternal

- a. Kesempatan (*opportunities*), yaitu semua kesempatan yang ada sebagai kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, peraturan yang berlaku atau kondisi perekonomian nasional atau global yang dianggap memberi peluang bagi Kota Serang untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.
- b. Ancaman (*threats*), yaitu hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi Kota Serang, seperti penggerusan, kerusakan sumber daya alam, bencana dan lain-lain.

Proses pengambilan keputusan dalam menentukan strategi Kebijakan yang tepat, tentu memerlukan analisis terhadap kondisi internal ataupun eksternal yang objektif, analisis ini akan diperoleh dari hasil penilaian pada kuesioner yang diisi oleh para ahli yang telah ditentukan. Hasil penilaian kondisi internal dan eksternal ini akan menghasilkan sebuah kelompok-kelompok faktor-faktor yaitu; *Strength, weakness, opportunity, threat*. Kemudian dari kelompok faktor-faktor yang diperoleh tersebut akan dilakukan sebuah analisis yaitu analisis matriks SWOT, dengan melakukan interaksi *merger* (penggabungan) dari kelompok faktor internal (*strength, weakness*), dengan kelompok faktor eksternal (*opportunity, threat*)

External Strategy factor Analysis (EFAS)

EFAS matrik digunakan untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan menyangkut peluang dan tantangan yang datang dari eksternal Kota Serang. Tahap dalam mengembangkan EFAS matrik adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan faktor strategis lingkungan eksternal yang mencakup perihal: peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).
- b. Penentuan bobot faktor strategis dengan skala mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Bobot mengindikasikan tingkat kepentingan faktor terhadap arah

kebijakan Kota Serang. Memperkirakan bobot dapat ditentukan dengan konsensus kelompok atau pendapat para ahli di bidang tersebut, atau yang lain. Total seluruh bobot dari faktor strategis harus sama dengan satu.

- c. Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor terhadap arah kebijakan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +3). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika nilai ancaman sangat besar ratingnya adalah 1. Sebaliknya, jika nilai ancamannya adalah sedikit ratingnya 2. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).
- d. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).

Tabel 3.4 EFAS

FAKTOR-FAKTOR	BOBOT	RATING	BOBOT	KOMENTAR
STRATEGI EKSTERNAL			X RATING	
PELUANG : 1. 2. ...				
ANCAMAN : 1. 2. ...				
TOTAL				

Sumber: Rangkuti (2006)

Internal strategy factor Analysis (IFAS)

Langkah penyimpulan dalam mengelola lingkungan internal dapat dipakai dalam menyusun IFAS matrik. Alat perumusan strategi ini menyimpulkan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang besar dalam suatu daerah dan juga memberikan suatu basis bagi pengidentifikasian dan pengevaluasian hubungan di antara daerah-daerah tersebut. *Intuitive judgement* sangat diperlukan dalam penggunaan IFAS matrik ini. Tahap pengembangan IFAS matrik adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan faktor strategis lingkungan internal yang mencakup perihal: kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).
- b. Penentuan bobot faktor strategis dengan skala mulai dari 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis arah kebijakan. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1.0.
- c. Pemberian rating faktor strategis untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh suatu faktor terhadap arah kebijakan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya.
- d. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh nilai faktor pembobotan. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4.0 (*outstanding*) sampai dengan 1.0 (*poor*).

Tabel 3.5 IFAS

FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
KEKUATAN : 1. 2.				
KELEMAHAN : 1. 2.				
TOTAL				

Sumber : Rangkuti (2006)

Matrik SWOT

Matrik SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi keempat faktor yang tercakup dalam analisis yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik SWOT digunakan untuk mengembangkan empat tipe alternatif strategi yaitu SO (*strengths - opportunities*), strategi WO (*weaknesses - opportunities*), strategi ST (*strengths - threats*), dan strategi WT (*weaknesses - threats*). Terdapat empat tahapan dalam membentuk matrik SWOT yaitu:

- a. Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi SO.
- b. Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi WO.

- c. Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST.
- d. Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman dan mencatat resultan strategi WT.

Bentuk matrik analisis SWOT bisa dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Matrik SWOT

IFAS EFAS	STRENGTH (S) Tentukan 1-5 faktor-faktor kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan 1-5faktor-faktor kelemahan internal
OPPORTUNITY (O) Tentukan 1-5faktor-faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREAT (T) Tentukan 1-5faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2006)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokus Penelitian

Kota Serang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Serang pada tahun 2007 melalui undang-undang Nomor 32 tahun 2007 terhitung sudah 11 tahun Kota Serang berdiri. diusia *puber* tentu terdapat penyesuai-penyesuaian yang akan dihadapi Kota Serang dalam menghadapi tantangan pembangunan dan perkembangan teknologi yang kian pesat.

Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 266,71 \text{ km}^2$. Dengan luas Provinsi Banten $9.662,92 \text{ km}^2$ Kota Serang merupakan Kabupaten/Kota terkecil kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang Selatan. Terdapat enam kecamatan yang ada di Kota Serang, Berikut disajikan data luas wilayah perkecamatan di Kota Serang :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Serang
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	%
1	Curug	49,6	18,59
2	Walantaka	48,48	18,18
3	Cipocok Jaya	31,54	11,82
4	Serang	25,88	9,7
5	Taktakan	47,88	17,95
6	Kasemen	63,36	23,75
		266,74	100

Sumber: Kota Serang dalam angka Tahun 2018: 17

Dari eman kecamatan yang dimiliki Kota Serang hanya Kecamatan Serang dengan luas terkecil yang berciri daerah perkotaan atau *CBD* (*central business district*). Kecamatan lain memiliki ciri dan potensi yang berbeda-beda dan berbatasan langsung dengan sejumlah wilayah. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Banten, yang terletak di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur;
- (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang di Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Kota Serang bagian Utara terkoneksi langsung dengan laut Jawa melalui Teluk Banten yang menyimpan potensi bahari yang cukup menjanjikan. Kawasan pesisir ini juga memiliki nilai historis yang tinggi dengan eksistensi sejumlah situs cagar budaya yang banyak tersebar di kawasan ini. Sementara di Timur berbatasan dengan kawasan industri padat karya di Kabupaten Serang dengan demikian di kawasan ini banyak di temukan perumahan dengan nilai investasi yang menjanjikan. Kota Serang bagian Selatan dan Barat sama-sama bercirikan agraris dengan potensi

pertanian dan perkebunan di samping itu terdapat Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan Group 1 Kopasus yang menjadi nilai strategis di dua kawasan ini.

Materi teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 yang merupakan hasil analisis tahun 2008 berupa rekomendasi pengembangan kapasitas ruang wilayah Kota Serang dimana penggunaan lahan di Kota Serang terklasifikasi dalam 5 (lima) kategori, yaitu: kawasan permukiman, komersial dan perkantoran, industri, kawasan lindung, dan kawasan penyangga. Adapun luas dan persentase masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Komposisi Rencana Pemanfaatan Lahan di Kota Serang
Berdasarkan RTRW Kota Serang 2010-2030

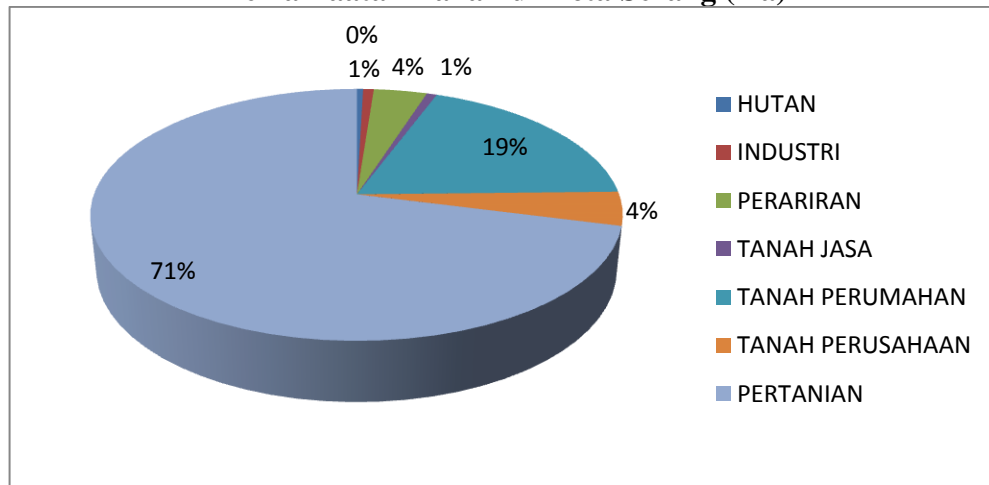
No	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	%
1	Pemukiman	89,95	33,72
2	Komersial & Perkantoran	33,13	12,42
3	Industri	4,84	1,82
4	Lindung	107,86	40,44
5	Penyangga	30,96	11,61
	Kota Serang	266,74	100

Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030 Hal : 6

Sementara berdasarkan kondisi eksisting yang ada, pemanfaatan lahan di Kota Serang secara umum terbagi dalam tujuh kategori, yaitu: kawasan hutan, industri/pegudangan, perairan, tanah jasa, tanah perumahan, tanah perusahaan, dan pertanian. Grafik berikut ini

menggambarkan kondisi eksisting penggunaan lahan di Kota Serang sebagaimana dimaksud di atas.

Grafik 4.1
Pemanfaatan Lahan di Kota Serang (Ha)



Sumber: Kota Serang dalam angka Tahun 2018 : 123

Kondisi eksisting pemanfaatan lahan di Kota Serang masih didominasi sektor pertanian dengan 71% diikuti dengan lahan perumahan 19% , perariran dan perusahaan 4% sementara sisanya hutan, industri dan perdagangan jasa tidak lebih dari 1%. Dominasi sektor pertanian pada penggunaan lahan di Kota Serang lah yang melatar belakangi ciri agraris yang melekat di Kota Serang kendati statusnya telah berubah menjadi kota dan ibu kota provinsi. Sementara lahan perumahan diperkirakan akan terus meluas mengingat tingginya permintaan akan hunian di Kota Serang. Demikian pula dengan daerah perkantoran, perdagangan dan jasa akan terus bertumbuh di sejumlah titik seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Dengan demikian dari kedua data di atas dapat diprediksi bahwa akan terjadi banyak alih fungsi lahan yang akan terjadi di Kota Serang.

Tabel 4.3
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Serang
Tahun 2012 – 2017

No	Kecamatan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jml	Kepa- datan	Jml	Kepa- Datan	Jml	Kepa- datan	Jml	Kepa- datan
1	Curug	50.067	1.009	50.483	1.018	53.269	1.073	53,505	1,079
2	Walantaka	79.125	1.632	80.725	1.665	86.018	1.773	87,799	1,811
3	Cipocok Jaya	81.976	2.599	83.888	2.660	85.958	2.728	88,232	2,797
4	Serang	229.896	8.883	232.897	8.999	220.423	8.510	220,608	8,524
5	Taktakan	81.694	1.706	83.609	1.746	88.421	1.845	89,819	1,876
6	Kasemen	91.016	1.436	91.827	1.449	94.345	1.490	95,669	1,510
Kota Serang		613.774	2.301	623.429	2.337	628.434	2.356	635,632	2,383

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2018

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Serang cenderung terkendali.

Dalam empat tahun terakhir LPP hanya naik 0,82 persen. Namun kepadatan atau persebaran penduduk yang tidak merata (terpusat di Kecamatan Serang) menimbulkan berbagai permasalahan seperti pemukiman kumuh, kemacetan dan banjir.

Bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kota Serang didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 442.744 jiwa atau sekitar 70,45%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun masing-masing sebesar 169.666 jiwa (27,00%) dan 16.024 (2,55%). Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dari tabel komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
	Laki-laki	Perempuan		
0 – 4	23.234	21.559	44.793	7,04
5 – 9	30.905	28.833	59.738	9,39
10 – 14	31.226	29.191	60.417	9,50
15 – 19	31.828	30.244	62.072	9,76
20 – 24	32.443	30.500	62.943	9,90
25 – 29	31.160	29.784	60.944	9,58
30 – 34	29.576	28.344	57.920	9,11
35 – 39	27.156	26.747	53.903	8,48
40 – 44	24.093	24.022	48.115	7,56
45 – 49	21.189	20.197	41.386	6,51
50 – 54	15.846	14.691	30.537	4,80
55 – 59	11.693	10.599	22.292	3,50
60 – 64	7.521	6.675	14.196	2,23
65 -69	4.250	3.935	8.185	1,28
70-75	1.980	2.316	4.296	0,67
> 75	1.897	1.998	3.895	0,61
Jumlah	325.997	309.635	635.632	100

Sumber: Disdukcapil Kota Serang Tahun 2018

Diprediksi lima sampai duapuluh tahun ke depan Kota Serang masih akan mendapat kesempatan bonus demografi, dimana penduduk usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Namun yang menjadi pertanyaan sejauhmana kuantitas sumber daya manusia mampu berproduktivitas, mengingat kualitas SDM Kota Serang masih di bawah rata-rata wajib sekolah 9 tahun.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk Kota Serang berusia 10 Tahun ke atas sebagian besar komposisinya terdiri dari yang tidak/belum tamat sd/mi/ sederajat (30,3 %) dan tamat sd/mi/ sederajat (32,7 %).

Gambaran tentang komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Persentase Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat	32,01
2	Tamat SD/MI/Sederajat	29,95
3	Tamat SMP/Sederajat	12,80
4	SMA/SMK/Sederajat	19,17
5	Universitas	6,07
Jumlah		100

Sumber: Disdukcapil Kota Serang Tahun 2018

Besarnya kuantitas tidak sebanding dengan kualitasnya yang menyebabkan pemberdayaan sumber daya manusia belum berjalan efektif di Kota Serang, 8,23 angka pengangguran terbuka berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah di Kota Serang.

Bila dilihat dari keragaman agama yang dianut penduduknya, Kota Serang telah mencerminkan sebagai kota yang tumbuh sebagai kota yang heterogen meski Agama Islam telah melekat dan identik sebagai bagian dari budaya lokal. Hal ini tampak dari komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2017

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	615.956	98,014
2	Kristen Protestan	6.781	1,079
3	Kristen Katholik	2.939	0,468
4	Hindu	256	0,041
5	Budha	2.498	0,397
6	Konghucu	2	0,000
7	Kepercayaan	2	0,000
		628.434	100

Sumber: Disdukcapil Kota Serang Tahun 2018

4.2. Deskripsi Data

Berdasarkan beberapa sumber yang peneliti kumpulkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berikut ini ditampilkan hasil-hasil pembangunan makro dan data lainya dalam menggambarkan hasil pembangunan dari RPJMD tahun 2014-2019. Jenis data adalah data sekunder sebagai sumber data utama, yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan instansi terkait lainnya.

1. Struktur ekonomi daerah
2. Index pembangunan manusia (IPM),
3. Tingkat pengangguran terbuka.
4. Angka kemiskinan.

4.3.1. Struktur Ekonomi Daerah

Analisis tentang struktur ekonomi daerah diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah mengingat ekonomi merupakan lokomotif dari pembangunan. Bila struktur ekonomi daerah didominasi kegiatan pertanian (agraris), maka arah pembangunan juga atau jasa maka kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan pada kegiatan tersebut.

Secara makro terdapat tiga struktur perkonomian. Pertama adalah struktur primer yang merupakan kegiatan dengan faktor-faktor produksi primer yaitu pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Sementara yang kedua adalah struktur sekunder yang menggunakan faktor produksi bukan dari sumber primer. Sektor konstruksi, industri, dan listrik dan air dan lain-lain sebagai contohnya. Dan terakhir sektor tersier yaitu perdagangan, jasa, transportasi dan lain-lain.

Di samping itu struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah bersangkutan. Perhitungan struktur ekonomi dapat dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan menghitung kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) daerah bersangkutan berdasarkan harga konstan. Berikut disajikan data PDRB Kota Serang tahun 2013-2017 atas dasar harga berlaku.

Tabel 4.7
Perkembangan PDRB Kota Serang Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2013 - 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

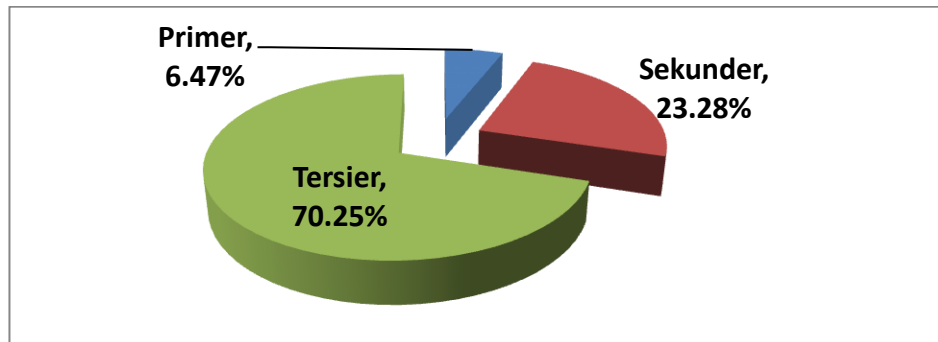
KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	883.585,73	916.748,10	936.915,28	1.007.630,53	1.133.907,37
Pertambangan & Penggalian	1.217,08	1.222,34	1.268,34	1.281,68	1.271,26
Industri Pengolahan	811.095,05	879.557,19	906.366,15	954.869,75	998.326,98
Pengadaan Listrik dan Gas	21.819,83	23.083,81	23.101,89	25.407,33	27.758,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.351,50	4.669,62	4.891,79	5.204,58	5.613,72
Konstruksi	2.600.801,97	2.718.143,45	3.011.381,04	3.176.526,20	3.411.855,46
Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.865.238,71	5.108.322,20	5.365.036,52	5.641.998,10	5.930.893,20
Transportasi dan Pergudangan	693.495,06	770.915,36	793.139,76	861.244,00	926.587,36
Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	903.956,83	1.004.468,53	1.073.839,25	1.160.772,81	1.241.738,15
Informasi dan Komunikasi	778.559,18	899.955,58	987.551,25	1.061.773,78	1.155.170,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	430.227,58	464.789,26	509.836,62	554.918,50	582.702,04
Real Estate	1.536.198,55	1.674.456,42	1.788.107,56	1.896.234,42	2.018.045,10
Jasa Perusahaan	133.523,16	144.044,86	152.841,75	164.639,94	175.476,80
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib	824.706,03	872.621,45	890.576,51	937.170,06	953.240,83
Jasa Pendidikan	585.068,07	626.022,83	673.725,77	723.391,92	760.866,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	315.345,76	337.313,01	361.683,10	392.763,92	418.194,55
Jasa Lainnya	281.593,89	298.749,87	318.743,90	340.274,21	372.684,29
PDRB ADHK	15.670.783,99	16.745.083,89	17.799.006,49	18.906.101,72	20.114.332,46

Sumber: BPS Kota Serang, 2018

Struktur ekonomi di Kota Serang dalam kurun waktu lima tahun terakhir didominasi kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dengan rata-rata nilai kontribusi pada PDRB sebesar 28%. Kemudian disusul sektor konstruksi dengan rata-rata nilai kontribusi pada PDRB sebesar 17,58%. Sementara sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor pertambangan, pengadaan listrik dan air, pengelolaan sampah dan limbah serta jasa perusahaan dengan kontribusi kurang dari 1%. Sementara sektor lainnya berada pada angka di antara 1%-10% dan tidak terlalu mencolok ketimpangannya. Ikhtisar dari uraian data diatas adalah bahwa kegiatan perekonomian di Kota Serang dalam lima tahun terakhir di dominasi oleh dua sektor yaitu perdagangan dan konstruksi. Dimana sektor lainnya tidak mampu berkontribusi diatas 10% sedangkan dua sektor tersebut jika dijumlah mampu menyentuh angka kontribusi 45,5% pada PDRB 2012-2017. Artinya hampir setengah kegiatan ekonomi di Kota Serang didominasi sektor tersebut, sementara sektor dengan potensi terendah ada pada sektor pertambangan, pengadaan listrik dan air, pengelolaan sampah dan limbah serta jasa perusahaan.

Sementara jika dilihat dari struktur ekonomi secara makro tahun 2012-2017, maka srukturnya sebagai berikut :

Grafik 4.2
Struktur Ekonomi Kota Serang



(Sumber : Peneliti diolah, 2018)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Struktur Perekonomian suatu daerah di lihat dari sisi distribusi persentase PDRB Lapangan usaha terbagi 3 kelompok :

Primer

(Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ; Pertambangan &Penggalian)

Sekunder

(Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Konstruksi)

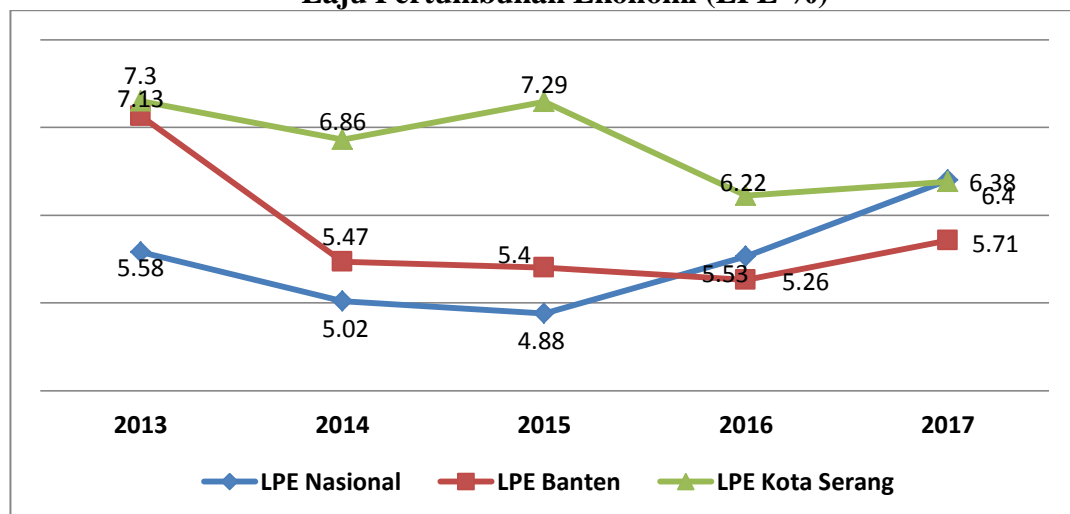
Tersier

(Perdagangan, Transportasi, Penyediaan Makan Minum, Informasi Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Jasa Pendidikan, Kesehatan Dan Jasa Lainnya)

Berdasarkan struktur ekonomi Kota Serang di atas dengan tegas sektor Tersier mendominasi kegiatan lapangan usaha yang ada

di Kota Serang dalam periode lima tahun terakhir. Artinya struktur ekonomi Kota Serang telah bergeser sangat lama ke sektor sekunder dan tersier (modern). Dengan demikian tidak heran pertumbuhan ekonomi di Kota Serang merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Karena daerah dengan basis kegiatan ekonomi sektor sekunder dan tersier (modern) lebih menjanjikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer (tradisional).

Grafik 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE %)



(sumber : BPS Kota Serang 2018)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang menempati peringkat ke-2 tertinggi di Provinsi Banten setelah Tangsel. Namun demikian akumulatif nilai PDRB Kota Serang masih sangat rendah dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Banten. Kota Serang ada di peringkat tiga terbawah bersama Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Tabel 4.8
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
(Juta Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017
Kab. Pandeglang	18.20	20.33	22.16	24.38
Kab. Lebak	18.59	20.67	22.52	24.75
Kab. Tangerang	91.41	101.56	109.17	119.29
Kab. Serang	51.32	56.68	61.26	66.05
Kota Tangerang	109.9	124.67	136.08	149.42
Kota Cilegon	69.74	77.25	82.41	89.14
Kota Serang	19.65	21.84	23.92	26.48
Kota Tangsel	50.07	56.01	60.72	69.32
Banten	428.74	478.54	516.32	564,43

(sumber : BPS Provinsi Banten 2018)

Berdasarkan data PDRB ADHB diatas laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang yang menempati peringkat kedua tertinggi di Provinsi Banten menjadi tidak terlalu istimewa. Mengingat Kota Serang masih jauh tertinggal dalam nilai akumulatif PDRB di Provinsi Banten. Untuk itu perlu kiranya untuk melihat PDRB perkapita yang diangkap ukuran riil kemakmuran masyarakat di suatu daerah.

Tabel 4.9
PDRB Perkapita (Juta Rp)

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017
Kab. Pandeglang (7)	15,32	17,02	18.47	20,23
Kab. Lebak (8)	14,77	16,28	17.61	19,21
Kab. Tangerang (6)	28,00	30,13	31.39	33,28
Kab. Serang (3)	35,08	38,45	41.27	44,22
Kota Tangerang (2)	54,98	60,90	64.99	69,28
Kota Cilegon (1)	172,09	187,47	196.84	209,70
Kota Serang (5)	31,15	33,97	36.53	39,73
Kota Tangsel (4)	33,54	36,30	38.09	41,53
Banten	36,65	40,07	42,47	45,34

(sumber : BPS Provinsi Banten 2018)

Berdasarkan Data PDRB perkapita Kota Serang menempati peringkat lima se Provinsi Banten. Fakta ini tidak terlalu buruk mengingat usia Kota Serang yang masih terbilang belia dan peningkatan pendapatan di tiap tahunnya walaupun semua kabupaten kota juga mengalami grafik yang sama. Dengan demikian pemerintah Kota Serang harus lebih mengefektifkan sektor-sektor unggulan yang berpotensi mendorong kegiatan ekonomi di Kota Serang sebagai

arah kebijakan pembangunan guna mempercepat laju pembangunan daerah.

4.3.2. Index Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *human Development Index (HDI)* muncul sebagai kritis sekaligus perbaikan terhadap angka pendapatan per kapita sebagai ukuran kemakmuran masyarakat yang hanya terfokus pada aspek ekonomi saja. Sedangkan kemakmuran masyarakat daerah tentunya tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan ini, munculah IPM yang merupakan angka gabungan dari tiga unsur penting kemakmuran rakyat, yaitu daya beli (pendapatan), pendidikan dan kesehatan.

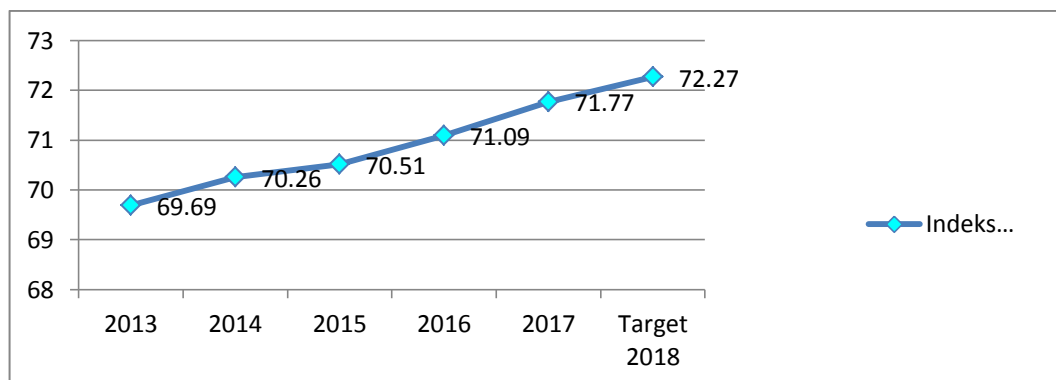
Tabel 4.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Serang Tahun 2014–2017

Komponen IPM	2014	2015	2016	2017
Indeks Pendidikan	62,87	62,97	63,67	64,64
Indeks Kesehatan	72,66	72,82	72,83	72,91
Indeks Pengeluaran	75,93	76,44	76,72	78,44
IPM Kota Serang	70,26	70,51	70,85	71,77

Sumber : BPS Kota Serang dan Bappeda Kota Serang, 2018

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Serang, pada umumnya masih relatif rendah. Hal ini ditandai dengan angka harapan sekolah yang hanya 12,63 dan rata-rata lama sekolah yang masih belum mencapai target wajib pendidikan dasar 9 tahun. Dalam periode yang sama, tingkat kesehatan di Kota Serang juga belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam lima tahun terakhir angka harapan hidup di Kota Serang cenderung stagnan dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya kondisi ekonomi masyarakat tergolong baik dan cenderung konsumtif, dilihat dari angka pencapaian indeks pengeluaran (daya beli) yang berada pada angka 12.660 ribu rupiah dari nilai standar yang direkomendasikan 10.007 ribu rupiah dan masih menunjukkan grafik yang meningkat. Selanjutnya untuk mengetahui posisi IPM Kota Serang hasilnya akan dikomparasikan dengan tingkat provinsi dan nasional sebagai berikut :

Grafik 4.4
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Serang Tahun 2013- Target 2018



Sumber : BPS Kota Serang, 2018

Apabila dibandingkan dengan IPM Nasional dan Provinsi Banten maka IPM Kota Serang memiliki nilai yang lebih tinggi atau hal ini berarti IPM Kota Serang berada pada posisi di atas rata-rata IPM Nasional dan IPM Provinsi Banten. Sebagai gambaran, IPM Nasional pada tahun 2017 sebesar 70,18 dan IPM Banten sebesar 70,96. Sedangkan IPM Kota Serang pada tahun 2017 sebesar 71,09 yang dibentuk dari komponen Indeks Kesehatan sebesar 72,86, Indeks Pendidikan/Pengetahuan sebesar 63,75, dan Indeks Pengeluaran sebesar 78,44. Sementara bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitar Provinsi Banten IPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/kota
di Provinsi Banten Tahun 2014-2016

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017
Kab. Pandeglang	62,06	62,72	63,04	63,69
Kab. Lebak	61,64	62,03	62,78	63,12
Kab. Tangerang	69,67	70,05	70,44	71,03
Kab. Serang	63,97	64,61	65,12	66,01
Kota Tangerang	75,87	76,08	76,81	77,01
Kota Cilegon	71,57	71,81	72,04	72,29
Kota Serang	70,26	70,51	71,08	71,31
Kota Tangsel	79,17	79,38	80,11	80,84
Banten	69,89	70,27	70,96	71,77

(Sumber: BPS Provinsi Banten 2018)

Secara keseluruhan pembangunan manusia di Kota Serang pada tahun 2017 mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan.

Pertumbuhan sebesar 0,82 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadikan Kota Serang sebagai daerah terbaik ke-4 se Provinsi Banten dengan besaran IPM 71,77.

Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Serang berada pada level yang cukup baik yaitu di atas rata-rata provinsi bahkan nasional. Namun fakta tersebut juga tidak terlalu istimewa karena Kota Serang hanya menempati peringkat ke-4 dalam *HDI ranking* se Provinsi Banten. Indeks pengetahuan yang masih rendah dan stagnasi pada indeks kesehatan yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah Kota Serang untuk diperbaiki demi kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing.

4.3.3. Angka Kemiskinan

Berbicara tentang kemiskinan, maka pertanyaan yang pertama kali muncul adalah siapa yang termasuk atau dikatakan orang miskin. Penduduk miskin secara teknis adalah penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan (*property line*) yang ditentukan oleh pemerintah atau badan tertentu yang berwenang. Karenanya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan yang berbeda-beda di setiap daerah. Selain itu jumlah penduduk miskin juga terpengaruhi oleh kenaikan harga barang (*inflasi*).

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang

tercermin pada angka kemiskinan, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di Kota Serang. Angka kemiskinan di Kota Serang dari Tahun 2012-2017 tampak berfluktuatif berkisar sekitar 5 sampai 6 persen. Sementara untuk jumlah penduduk miskin, cenderung mengalami kenaikan yaitu dari jumlah sebanyak 35,00 ribu jiwa pada Tahun 2012 menjadi 35,40 ribu jiwa pada Tahun 2017. Gambaran mengenai dinamika angka kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

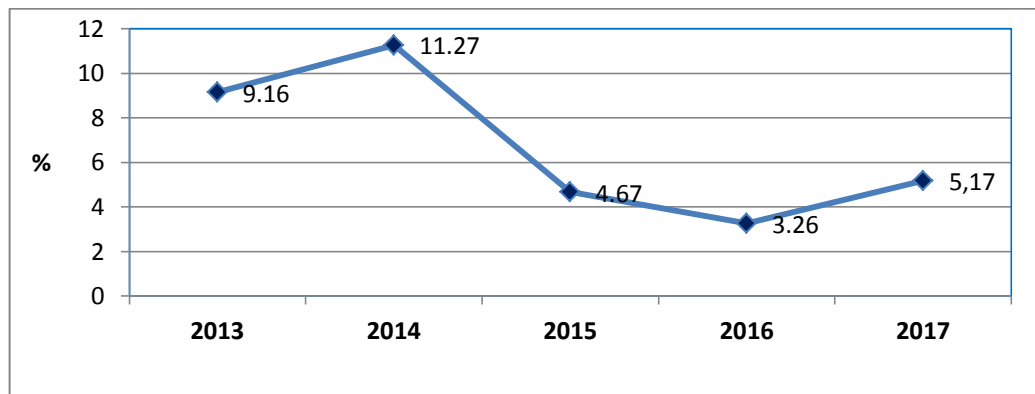
Tabel 4.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Serang
Tahun 2012-2017

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2012	35,00	5,69	231.020
2013	36,70	5,92	236.039
2014	36,18	5,70	242.977
2015	40,19	6,28	255.614
2016	36,40	5,58	281.926
2017	35,40	5,57	297.811

Sumber: BPS Kota Serang Kota Serang Tahun 2018

Fluktuasi angka kemiskinan di Kota Serang sangat dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan laju inflasi. Inflasi sangat mempengaruhi garis kemiskinan yang berlaku di Kota Serang di mana Kota Serang merupakan daerah perkotaan dengan dominasi kegiatan perdagangan yang tinggi.

Grafik 4.5
Perkembangan Laju Inflasi (%) Kota Serang Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kota Serang, 2018

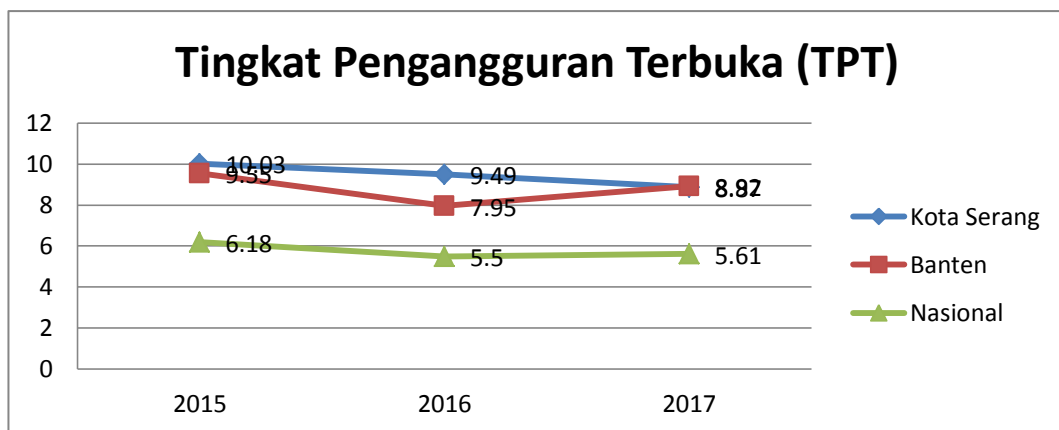
Sejak Tahun 2014, tingkat inflasi Kota Serang cenderung lebih tinggi dari inflasi Provinsi Banten dan Nasional, namun besarnya cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2016, tingkat inflasi Kota Serang sebesar 3,26 %, sementara inflasi Provinsi Banten sebesar 2,94 % dan Nasional sebesar 3,02 %. Sementara itu sampai akhir tahun 2017, inflasi Kota Serang sudah mencapai 5,17 %.

kondisi tersebut memerlukan pengendalian inflasi lebih lanjut khususnya oleh Pemerintah Kota Serang. Mengingat melonjaknya kenaikan penduduk miskin tahun 2015 juga dipengaruhi inflasi umum yang melanda Indonesia secara nasional. selain itu jumlah pengangguran juga menjadi penyebab tidak terkendalinya angka kemiskinan di Kota Serang.

4.3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penyediaan lapangan kerja merupakan sasaran utama pembangunan daerah mengingat multilayer efek negatif yang ditimbulkan angka pengangguran yang tinggi seperti kemiskinan sampai kriminalitas. Maka penting untuk melihat atau mengetahui informasi tentang tingkat pengangguran terbuka dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Grafik 4.6



(BPS Provinsi Banten: 2018)

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, jumlah pengangguran mencapai 27.436 jiwa atau 10,03 persen dari jumlah usia kerja 15 tahun ke atas yang saat ini berjumlah 436.900 jiwa. Angka tersebut turun tiap tahunnya sampai menyentuh angka 8.87 pada tahun 2017. Namun demikian angka ini masih lebih besar dari tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Banten yang merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi ditingkat nasional. artinya Kota

Serang berkontribusi lebih pada tingkat pengangguran di tingkat provinsi.

Tabel 4.13
Aspek Ketenagakerjaan Kota Serang
Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2013	Capaian Tahun 2014	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	62,61	62,58	63,87	59,52	59,21
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	18,69	22,99	19,70	21,35	83,33
3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	62,61	62,58	63,87	59,52	59,21
4	Pencari kerja yang ditempatkan	%	1,80	2,70	3,40	6,61	6,77
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	11,29	10,03	10,00	8,87	8,43
6	Tingkat kesempatan kerja	%	88,71	89,97	90,00	84,58	91,57
7	Keselamatan dan perlindungan (% Perusahaan yang menerapkan K3)	%	16,12	8,21	16,42	43,39	-

Sumber : BPS dan Disnakertrans Kota Serang Tahun 2018

Pada tahun 2017 penduduk usia 15 tahun ke atas tercatat yang termasuk sebagai angkatan kerja di Kota Serang sebesar 59,21 persen dengan komposisi bekerja 57,74 persen dan mencari kerja 6,05 persen sedangkan yang bukan angkatan kerja tercatat sebesar 36,21 persen. Dengan komposisi tersebut terbilang cukup baik dengan lebih banyak angkatan kerja yang bekerja berbanding bukan angkatan kerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Namun demikian tingkat

pengangguran terbuka di Kota Serang terbilang cukup besar yaitu 8,87% yang artinya 9 dari 100 angkatan kerja di Kota Serang sedang mencari pekerjaan.

Dilihat dari komposisi yang ada, angkatan kerja di Kota Serang didominasi oleh lulusan Sekoah dasar dan SLTP sederajat dengan angka 42,62 persen dari total angkatan kerja di Kota Serang. Sementara yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi hanya sebesar 12,70 persen. hal ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kota Serang, dimana program wajib belajar 9 tahun pun belum terpenuhi di kota ini. Pemerintah Kota Serang dituntut serius dalam menangani masalah ini, mengingat pengangguran adalah masalah yang memiliki implikasi sosial yang luas.

4.3. Pembahasan

Deskripsi data dan lokus mengenai Indikator pembangunan yang merupakan unsur-unsur pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kota Serang, menggambarkan bahwa dalam melakukan penentuan arah kebijakan pembangunan di Kota Serang masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks. sehingga perlu analisis yang lebih mendalam untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti menggunakan pisau analisis Dunn *ex post-ante procedure policy analysis* (2003:185) dengan prosedur analisis sebagai berikut :

1. Evaluasi (*ex-post*)
2. Rekomendasi (*ex-ante*)

Melalui *ex post-ante procedure policy analysis* peneliti mencoba mengungkap gejala-gejala yang terjadi di masa lalu pada data-data indikator pembangunan (PDRB, IPM, LPE, Angka kemiskinan) yang akan di analisis lebih mendalam menggunakan metode *Location Quotien* dan *SWOT analysis*.

Hasil dari perhitungan *LQ* dan *SWOT* akan digunakan sebagai bahan evaluasi arah kebijakan dan strategi pada periode sebelumnya (RPJMD 2014-2019). Dari evaluasi tersebut akan diketahui irisan-irisan kebijakan yang dapat menjadi rekomendasi arah kebijakan untuk tahun 2019-2024 beserta strateginya.

Tabel 4.15
Oprasionalisasi analisis
arah kebijakan dan strategi *ex post-ante*

No	Teknik Analisis	Tujuan
1	Analisis LQ 2013-2014 (<i>ex-post</i>)	Mengevaluasi Arah Kebijakan RPJMD 2014-2019
2	Analisis LQ 2016-2017 (<i>ex-ante</i>)	Merekomendasi Arah Kebijakan RPJMD 2019-2024
3	Analisis SWOT 2018 (<i>ex-ante</i>)	Merekomendasi Strategi RPJMD 2019-2024

(Peneliti diolah 2018)

4.3.1. Evaluasi

Menurut Dunn (2000:608) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, hasil-hasil evaluasi dimaksud akan menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali.

Evaluasi akan dilakukan dengan dua cara. *Pertama* akan dilakukan Analisis LQ tahun 2013-2014 yang telah disebutkan tujuannya diatas. *Kedua* dari aspek anggaran dan dari indikator kinerja sektor yang menjadi visi dalam RPJMD tahun 2014-2019.

Analisis LQ 2013-2014

Analisis LQ tahun 2013-2014 dilakukan untuk mengevaluasi arah kebijakan RPJMD 2014-2019 yaitu “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang bertumpu pada Potensi Pertanian, Perdagangan dan Budaya”. 2013-2014 merupakan tahun dasar RPJMD yang menggambarkan kondisi obyektif saat itu dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kota Serang. Berbekal data PDRB adhk 2013-2014 yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, analisis LQ berikut memberikan informasi tentang sektor basis yang menjadi keunggulan Kota Serang yang kemudian akan dibandingkan dengan arah kebijakan diatas untuk melihat kesesuaian antara keduanya :

Tabel 4.14
Perhitungan Koefisien Lokasi
PDRB (adhk) Kota Serang Tahun 2013-2014

NO	Kategori	2013	2014
	PDRB	0,94	0,96
1	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,02	2,93
2	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,46	2,49
3	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2,18	2,17
4	Konstruksi	1,83	1,69
5	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,67	1,71
6	Jasa lainnya	1,26	1,29
7	Jasa pendidikan	1,26	1,28
8	Real estate	1,20	1,21
9	Informasi dan komunikasi	1,02	0,99
10	Jasa keuangan dan asuransi	0,96	0,99
11	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,93	0,94
12	transportasi dan pergudangan	0,67	0,71
13	Jasa Perusahaan	0,87	0,87
14	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,28	0,28
15	Industri pengolahan	0,13	0,14
16	Pengadaan listri dan gas	0,10	0,10
17	pertambangan dan penggalian	0,01	0,01

- Nilai $LQ > 1$ = Sektor Basis
- Nilai $LQ < 1$ = Sektor non Basis

Sumber: Diolah dari Buku Saku PDRB Provinsi Banten 2014

Hasil perhitungan LQ tahun 2013-2014 menyatakan bahwa sejumlah sektor yang menjadi basis Kota Serang adalah : administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, jasa kesehatan, jasa lainnya, jasa pendidikan, dan *reaal estate*. Dengan telah diketahui visi RPJMD Kota Serang 2014-2019 yang telah di sebutkan diatas, maka ketidaksesuaian antara hasil LQ dan Visi RPJMD hanya terdapat pada sektor pertanian yang tidak masuk dalam sektor basis. Sementara sektor perdagangan, jasa dan pendidikan masuk dalam katagori sektor basis.dengan demikian hasil evaluasi arah kebijakan 2014-2019 menggnakan metode LQ menyatakan bahwa arah kebijakan telah sesuai dengan nilai LQ terkecuali sektor pertanian.

Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Indikator Kinerja

Analisis LQ yang bersumber dari data PDRB memiliki keterbatasan jangkauan sektor-sektor ekonomi saja, sehingga perlu kiranya untuk melakukan evaluasi arah kebijakan menggunakan sudut pandang lain untuk membuat evaluasi yang lebih komprehensif. Sekaligus membuktikan apakah rekomendasi melalui analisis LQ benar berimplikasi positif pada sektor yang direkomendasikan.

Visi RPJMD tahun 2014-2019 yakni “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi

Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya” seyogyanya menghasilkan kebijakan keuangan yang di arahkan pada sektor-sektor tersebut. Namun kenyataannya jika dilihat dari realisasi anggaran dari 2014-2018 triwulan I kebijakan keuangan mengarah pada 10 sektor berikut :

Table 4.16
Realisasi anggaran tahun 2014-2018
**sampai triwulan I 2018*

No	Bidang Urusan	Realisasi
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 361.511.705.144
2	Pendidikan	Rp 172.848.392.063
3	Kesehatan	Rp 148.585.966.734
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 107.235.321.711
5	Lingkungan Hidup	Rp 90.432.331.395
6	Keuangan	Rp 60.864.351.596
7	Perencanaan	Rp 34.952.232.039
8	Pertanian	Rp 32.182.471.420
9	Perdagangan	Rp 31.853.791.680
10	Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 29.221.423.944

Diolah dari LKPJ akhir tahun 2014-2018

Merujuk pada nilai LQ, sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah selaras dengan nilai LQ nya. Dimana realisasi sejumlah Rp.468.747.026.855 telah berhasil mumbuat sektor basis konstruksi dan *Real Estate* dengan koofisien 1,86 dan 1,21. Namun yang menarik adalah dua urusan pilihan yakni perdagangan dan pertanian yang memiliki realisasi anggaran yang tidak terlalu jauh berbeda namun memiliki *output* kebijakan yang sangat berbeda. Kebijakan pendidikan meski menghabiskan anggaran yang besar

belum mampu memberikan hasil yang signifikan terhadap indeks pendidikan di Kota Serang. Sementara sektor Kebudayaan yang menjadi potensi menurut visi tersebut tidak masuk dalam 10 besar kebijakan keuangan di Kota Serang. Kesimpulannya hampir semua kebijakan keuangan telah sesuai dengan visi RPJMD kecuali sektor kebudayaan yang menempati urutan 21, namun bila di evaluasi menggunakan nilai *LQ* maka sektor pertanian dan kebudayaan tidak termasuk katagori potensi dengan koefisien lokasi hanya 0,98 ini terbukti dari indikator kinerja yang akan dijelaskan pada evaluasi berikutnya.

Melanjutkan evaluasi terkait realisasi anggaran di atas, kali ini akan dilakukan evaluasi berdasarkan indikator kinerja pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan pada empat sektor utama yang termaktub dalam Visi RPJMD 2014-2019 yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa, pertanian, juga budaya.

1. Pendidikan

Kota Serang bercita-cita menjadi kota pendidikan dengan dana lebih dari *seratus tujuh puluh dua milyar* rupiah yang telah dikeluarkan Kota Serang dalam membiayai pendidikan Kota Serang lima tahun terakhir berikut ditampilkan capaian indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan :

Tabel 4.13
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
(Urusan Wajib Bidang Pendidikan)

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2014-2017					Sumber Data
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Angka Melek Huruf	%	97,15	97,6	97,79	96,25	94,15	Dindikbud
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,56	8,58	8,59	8,60	8,61	Dindikbud
3	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,9	0,8	0,02	0,02	0,02	Dindikbud
4	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	1	0,08	0,04	0,14	0,13	Dindikbud
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	1,40	1,59	0,11	0,04	-	Dindikbud
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,1	99,29	100	91,57	108,54	Dindikbud
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98,5	98,6	98,70	99,7	138,59	Dindikbud

Dalam lima tahun terakhir angka melek huruf mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 97,15 ke angka 94,15 hal ini tentu menjadi tragedi mengingat angka melek huruf merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pendidikan. Kendati angka putus sekolah telah mengalami penurunan namun dan angka partisipasi juga meningkat nyatanya belum mampun mendongkrak angka rata-rata lama sekolah Kota Serang yang cenderung stagnan selama lima tahun terakhir.

Dengan demikian meski telah menghabiskan sejumlah dana yang besar kinerja bidang pendidikan belum maksimal outpunya perdasarkan indikator

kinerja untuk itu pendidikan harus menjadi perhatian lanjutan pemerintah Kota Serang di periode yang baru mengingat masalah pendidikan menjadi akar masalah tingginya pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Serang juga dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0

2. Perdagangan,

“Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli, dan laju pertumbuhan ekonomi”.

Tabel 4.18
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
Bidang Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2014-2017					Sumber Data
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	22,88	23,76	23,00	23,10	28,23	BPS dan DisdaginkopUKM
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	2	2	2	2	50	DisdaginkopUKM
3	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	7,39	6,86	6,29	6,22	6,38	BPS dan Bappeda
4	Indeks daya beli	Indeks	75,04	75,93	76,28	76,72	78,44	BPS dan Bappeda

Sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar dalam komposisi PDRB Kota Serang dengan cakupan bina kelompok dagang informal yang mencapai 50 kelompok kebijakan ini dinilai berhasil meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih stagnan, namun angka 6,38 tersebut masih lebih tinggi dari LPP provinsi dan nasional. Bahkan LPE Kota Serang juga paling tinggi

pertumbuhannya di Provinsi Banten setelah Tangsel. Dengan demikian nilai LQ teruji tepat menjadikan sektor perdagangan sebagai sektor basis.

3. Pertanian

“pengembangan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan”

Tabel 4.17
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
Bidang Pertanian, perikanan dan kelautan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2014-2017					Sumber Data
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	6,37	5,43	5,81	5,9	5,99	DISTAN
2	Kontribusi sektor pertanian, kehutan dan kelautan terhadap PDRB	%	6	5,98	5,93	6,09	6,46	DISTAN
3	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	200	264	260	305	169	DISTAN
4	Produksi perikanan	Ton	3.785,91	4.734,67	3.090,89	4.070,81	5.797,18	DISTAN
5	Konsumsi ikan	Kg/jiwa	21,38	21,13	17,63	21,44	24,99	DISTAN
6	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	35	27	37	30	10	DISTAN
7	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	786,93	2.917,75	1.955,90	2.964,30	3.706,22	DISTAN

Meskipun sektor pertanian memegang luas lahan terbesar di Kota Serang namun kontribusinya pada PDRB hanya 6,46. Dengan produktivitas bahan pangan utama yang stagnan dan cakupan bina kelompok tani dan nelayan yang menurun hampir setengah dari jumlah di tahun sebelumnya. Meskipun ada harapan pada

produktivitas perikanan dan kelautan yang cenderung progresif, namun tidak cukup membuat sektor ini menjadi sektor basis terbukti dengan nilai LQ yang hanya 0,98.

4. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi poensi yang menjadi perhatian Kota Serang dalam visi RPJMD Kota Serang tahun 2014-2018. Namun hal ini tidak terlihat dalam realisasi anggaran urusan kebudayaan yang hanya menempati urutan ke 21 dengan realisasi sejumlah Rp 11.190.010.402 dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.16
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
(Urusan Wajib Bidang Kebudayaan)

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja 2014-2017					Sumber Data
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Rasio	4,34	5,49	5,65	5,81	5,19	Dindikbud
2	Jumlah grup kesenian	Group	256	337	352	365	330	Dindikbud
3	Jumlah event seni budaya dalam 1 tahun	Event	4	4	6	4	9	Dindikbud
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	4	4	49	49	42	Dindikbud
5	Jumlah fasilitasi pertunjukan, pameran, festival, lomba dan pawai	Sanggar	-	-	10	15	9	Dindikbud

Dari capaian indikator di atas terlihat ketidak seriusan pemerintah Kota Serang dalam mengembangkan potensi budaya yang termaktub dalam Visi

RPJMD nya. Koefisien grup budaya yang menurun cagar budaya yang dilestarikan dan fasilitas seni budaya menurun jumlahnya dari tahun sebelumnya. Padahal secara historis kebudayaan Banten di Kota Serang amatlah melekat dengan eksisnya kawasan wisata Banten Lama yang di dalamnya banyak terdapat benda dan situs cagar budaya.

4.3.2 Rekomendasi

Prosedur analisis kebijakan dari rekomendasi memungkinkan analisis menghasilkan tentang serangkaian aksi dimasa mendatang untuk menghasilkan konsekuensi yang berharga bagi individu, kelompok, atau masyarakat seluruhnya. Prosedur rekomendasi meliputi transformasi informasi mengenai aksi-aksi kebijakan yang akan menghasilkan keluaran yang bernilai. (Dunn 2003:283)

Rekomendasi dibuat menggunakan dua analisis yaitu SWOT dan LQ. LQ akan menghasilkan rekomendasi arah kebijakan berdasarkan perhitungan sektor basis yang berpotensi menjadi keunggulan bagi Kota Serang. SWOT akan menghadirkan strategi dari arah kebijakan yang telah di rekomendasikan oleh LQ.

Analisis LQ 2016-2017 (*ex-ante*)

Analisis LQ 2016-2017 bertujuan untuk mengetahui rekomendasi arah kebijakan RPJMD tahun 2019-2024. Rekomendasi dibuat berbekal data PDRB adhk 2017 dan 2016 yang merupakan data terkini sebagai dasar menentukan sektor basis di Kota Serang.

Tabel 4.14
Perhitungan Koefisien Lokasi
PDRB (adhk) Kota Serang Tahun 2016-2017

NO	Kategori	2016	2017
	PDRB	0,97	0,98
1	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,75	2,68
2	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,53	2,50
3	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2,19	2,17
4	Konstruksi	1,75	1,74
5	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,73	1,71
6	Jasa pendidikan	1,27	1,25
7	Jasa lainnya	1,21	1,23
8	Real estate	1,19	1,17
9	Informasi dan komunikasi	0,99	1,00
10	Pertanian, ehutanan, dan perikanan	0,91	0,98
11	Jasa keuangan dan asuransi	0,96	0,97
12	Jasa Perusahaan	0,85	0,84
13	transportasi dan pergudangan	0,69	0,68
14	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,28	0,28
15	Industri pengolahan	0,14	0,14
16	Pengadaan listri dan gas	0,12	0,13
17	pertambangan dan penggalian	0,01	0,01

- *Nilai LQ >1 = Sektor Basis*
- *Nilai LQ <1 = Sektor non Basis*

Sumber: Diolah dari Buku Saku PDRB Provinsi Banten 2018

Hasil dari analisis LQ diatas menyatakan bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib merupakan sektor unggulan di Kota Serang dengan nilai LQ 2,68; diikuti sektor perdagangan besar, eceran, serta reparasi kendaraan bermotor dengan nilai LQ sebesar 2,17. Serta penyediaan akomodasi makan dan minum dengan nilai 2.50.

Di samping kedua sektor basis di atas, Kota Serang juga memiliki sektor-sektor potensial berdasarkan nilai LQ-nya, yaitu: sektor konstruksi dengan nilai LQ sebesar 1,74; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai LQ sebesar 1,71; sektor jasa pendidikan dengan nilai LQ sebesar 1,25; sektor real estate dan sektor jasa-jasa lainnya masing-masing dengan nilai LQ sebesar 1,15.

Sementara sektor lainnya memiliki nilai LQ di bawah 1 yang artinya sektor tersebut tidak potensial sebagai arah kebijakan pembangunan daerah karena dinilai tidak memiliki daya saing walau dengan angka kumulatif yang relatif tinggi.

Kosekuensi Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki relevansi yang nyata terhadap besaran nilai LQ di Kota Serang pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Dengan demikian terdapat dua pemerintahan aktif yang melakukan pembangunan di Kota Serang yaitu pemerintahan kota dan provinsi belum lagi sejumlah kantor wilayah perwakilan lembaga vertikal dari pemerintah pusat. Dari bidang

pertahanan terdapat markas Grup 1 KOPASUS dan markas militer lain setingkat kota dan provinsi juga POLRES dan POLDA. Terakhir terdapat dua kantor BPJS tingkat provinsi dan kota yang ada di Kota Serang yang di mana dua lembaga ini menghimpun dana jaminan sosial langsung dari masyarakat.

Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan penyediaan akomodasi dan makan minum menggambarkan geliat perdagangan dan jasa di Kota Serang merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Konsumsi regional yang besar, lokasi geografis dan politis sebagai daerah penghubung antara daerah selatan dan timur banten menjadi alasan logis besarnya nilai LQ pada sektor ini, di samping nilai historis Kota Serang yang merupakan daerah pusat perdagangan dan jasa sejak dahulu kala.

Selain sektor-sektor di atas, sektor jasa pendidikan dan kesehatan serta konstruksi dan *real estate* juga menjadi sektor yang potensial berdasarkan besaran nilai LQ nya. Berdasarkan data BPS (2016), saat ini tercatat sekiranya 19 perguruan tinggi negeri dan swasta yang berlokasi di wilayah Kota Serang, dengan menyerap mahasiswa mencapai 42.679 orang mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, hadirnya sejumlah pondok pesantren ternama di Kota Serang juga menjadi magnet bagi masuknya santri-santri dari berbagai daerah daerah di Indonesia ke

Kota Serang. Berdasarkan data BPS (2016), di Kota Serang tercatat terdapat sekira 175 pondok pesantren salafiyah (tradisional), dan 26 pondok pesantren khalafiyah (modern) yang mampu menyerap santri mencapai lebih dari 10.773 orang.

Banyaknya kantor pemerintahan di Kota Serang karena merupakan ibukota provinsi dan juga kantor swasta meski tidak signifikan mendorong pegawainya berkonsumsi, berdidik dan berobat bahkan tinggal di Kota Serang. Jika memilih tinggal tentu harus memiliki tempat tinggal (rumah/kontrakan) yang menjadi alasan logis menjamurnya perumahan dan kontrakan di Kota Serang yang merupakan produk dari sektor kontruksi dan *real eststate*. Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta empiris tersebutlah sektor-sektor seperti administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan social wajib, perdagangan dan jasa, juga kontruksi dan *real estate* memiliki koefisien lokasi yang potensial dibanding wilayah lain di Provinsi Banten.

Analisis SWOT (ex-ante)

Setelah di ketahui sektor-sektor yang menjadi basis dan non basis di kota serang melali analisis LQ. hasil perhitungan LQ akan menjadi masukan (input) untuk faktor-faktor strategis arah kebijakan pembangunan kota serang Kota Serang, yang dikombinasi dengan data dekripsi lokasi dan deskripsi data melalui analisis SWOT. Dalam

analisis SWOT akan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga dapat merumuskan strategi yang tepat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Faktor kekuatan (*strengths*) Kota Serang adalah kota yang sangat strategis, menjadi penengah antara Banten Selatan dan Utara wilayah pembuka jalur perdagangan dari zaman kesultanan Banten hingga saat ini baik jalur darat maupun lautnya. Kendati berbentuk kota, Kota Serang masih memiliki 71% lahan budidaya yang bisa dikembangkan. Tidak heran jika Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Serang cukup baik yaitu pada angka 6,22 lebih tinggi dari LPE provinsi dan nasional. Dari aspek kesejahteraan masyarakat Pendapatan per kapita Kota Serang adalah sebesar Rp. 36.530.000,00 yang merupakan peringkat ke-5 di Provinsi Banten dengan pengeluaran riil Rp.12.660.000,00 lebih tinggi dari yang di standarkan. Terakhir IPM Kota Serang menempati peringkat ke-4 di Provinsi Banten yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional.

Faktor kelemahan (*weakness*) kendati memiliki 71% lahan budidaya, kontribusi sektor pertanian sangat kecil yaitu hanya sebesar 6%. Kepadatan penduduk juga relatif tinggi yaitu pada angka 2355 jiwa/km. Begitu pula persebarannya yang terpusat di Kecamatan Serang. Dari aspek kesejahteraan masyarakat masih memiliki banyak catatan negatif yaitu angka pengangguran yang tinggi, dan angka kemiskinan bahwa yang tiap tahun bertambah jumlahnya. Kemudian

yang patut untuk jadi perhatian adalah indeks pengetahuan/pendidikan relatif rendah yaitu pada angka 63,75 dengan rata-rata lama sekolah 8,6 tahun yang masih kurang dari wajib belajar 9 tahun. Dari sektor kesehatan angka harapan hidup juga mengalami stagnasi.

Faktor peluang (*opportunities*) Kota Serang adalah Ibu Kota Provinsi Banten tidak heran nilai LQ pada administrasi pemerintahan paling tinggi yaitu sebesar 2,85. Sebagai pusat pelayanan publik Kota Serang memiliki struktur Ekonomi yang modern yang bertumpu pada sektor tersier dan sekunder oleh karena itu sektor perdagangan juga menyumbang nilai LQ tertinggi ke-3 yaitu sebesar 2,15. Selain itu letaknya yang strategis menjadikan sektor akomodasi, makanan, dan minuman menempati peringkat ke-2 nilai LQ tertinggi yaitu 2,49 hal ini di latar belakanginya banyaknya *Urban Commuter* di Kota Serang selain warga serang yang bekerja di daerah penyangga ibu kota, juga kedatangan pegawai-pegawai negeri sipil Provinsi Banten dan pelajar juga mahasiswa yang hidup tinggal dan makan di Kota Serang.

Faktor ancaman (*threats*) walaupun perekonomian di Kota Serang melaju ke arah yang baik namun sejatinya akumulasi nilai PDRB Kota Serang masih sangat jauh dibandingkan daerah lainya di Provinsi Banten. Kota Serang hanya berada di peringkat ke-6 di atas Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Angka kemiskinan juga cenderung fluktuatif 5-6% dengan kenaikan penduduk miskin di tiap tahunya. Hal ini dilatar belakanginya lesunya sejumlah sektor

perekonomian seperti Pertanian yang hanya memiliki nilai LQ 0,92 padahal lahan di Kota Serang 71% adalah lahan budidaya. Kemudian sektor teknologi, komunikasi dan informasi yang mengalami penurunan pada nilai LQ nya yaitu dari 1- 0,99 situasi ini berbahaya mengingat TIK merupakan sektor yang menjadi pemeran utama dalam revolusi industri 4.0.

Setelah mematakan kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman pembangunan di Kota Serang. Dimensi yang harus juga diperhatikan adalah faktor internal dan eksternal Kota Serang itu sendiri. Faktor internal terdiri atas kelemahan dan juga kekuatan. Sementara eksternal adalah peluang dan ancaman. Kedua faktor tersebut harus di bahas secara mendalam dalam analisis faktor strategis. Selain itu, agar analisis faktor internal dan eksternal menjadi lebih baik dan terukur, maka penggunaan bobot dan *rating* dapat dilakukan untuk masing-masing unsur yang terdapat pada dua faktor tersebut. Dengan cara demikian akan dapat diketahui faktor faktor mana yang dapat ditetapkan sebagai isu-isu strategis utama yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pembangunan di Kota Serang. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang teknik analisis data, bobot dan *rating* di tentukan berdasarkan urgensi suatu faktor/sektor terhadap arah pembangunan di Kota Serang. Layak atau tidaknya suatu sektor/faktor menjadi tujuan arah kebijakan 2019-2024. Dalam penilaiannya bobot dan *rating*

dibantu oleh para ahli yang juga telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Faktor-faktor tersebut jika digambarkan menggunakan Matriks IFAS (Internal Factor Analysis System) EFAS (External Factor Analysis Summary) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.15
Internal Factor Analysis Summary

NO	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
A	Kekuatan			
1	Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten. Dengan demikian terdapat dua pemerintahan yang berlokasi langsung di Kota Serang yaitu pemerintah kota dan provinsi ditambah lagi kantor wilayah pemerintahan pusat yang juga berlokasi di ibukota provinsi. Hal ini mendorong tumbuhnya sektor administrasi pemerintahan yang merupakan sektor dengan potensi tertinggi di Kota Serang dengan nilai koefisien lokasi 2,87	0,1	3,4	0,34
2	Potensi pertanian yang besar dengan lahan budidaya Kota Serang sebesar 70,86%	0,02	2,8	0,056
3	Kehidupan beragama yang relatif baik di masyarakat	0,02	3,6	0,072
4	Potensi wisata religi banten lama dan obyek wisata lain di Kota Serang	0,03	4	0,12
5	Kemampuan wirausaha yang relatif tinggi dan ulet dengan 5716 lebh UMKM di Kota Serang	0,04	2,8	0,112
6	Daya beli masyarakat yang baik dengan terus meningkatnya Indeks pengeluaran setiap tahun sampai dengan angka 78,44	0,03	3,4	0,102
7	Terjaganya nilai kesenian dan budaya dengan jumlah grup kesenian 330 grup	0,02	2,8	0,056
8	Pengaruh ulama dan toko agama dalam masyarakat yang kuat dengan jumlah majlis taklim sejumlah 141 dan 5.491 jamaah serta 201 pondok pesantren dengan santri lebih dari 10.773	0,02	3,6	0,072
9	Aksesibilitas pendidikan yang baik dengan 111 TK, 260 SD, 114 SMP, 91 SMA/SMK/MA negeri dan swasta yang tersebar merata di Kota Serang serta 136 Pondok pesantren dan 19 perguruan tinggi dengan angka partisipasi yang meningkat setiap tahunnya.	0,03	3,2	0,096
10	Indikator kinerja layanan kesehatan yang relatif baik dengan jumlah kematian ibu dan bayi dan ratio gizi buruk yang	0,03	2,2	0,066

	meurun setiap tahunnya dan angka harapan hidup yang stabil 67,38 tahun			
11	Peran aktif perempuan dalam masyarakat dengan ratio partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 17,51 serta 78 PKK aktif dan 614 Posyandu	0,03	2,8	0,084
12	Geostrategis Kota Serang dalam konteks regional sebagai daerah transit dari pintu gerbang masuk ke pulau Jawa di Kota Cilegon, dan penengah antara daerah Rural dan Urban dalam hal ini Banten Selatan dan Banten Utara sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang kompetitif dengan nilai LQ 2,24	0,05	3,4	0,17
B	Kelemahan			
1	Tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 8,74%	0,08	1,8	0,144
2	Masih tingginya sikap permisif terhadap perilaku korupsi kolusi dan nepotisme di Kota Serang dengan indeks persepsi korupsi 4,87	0,03	2	0,06
3	Masih rendahnya kualitas pendidikan dengan masih tidak terpenuhinya wajib belajar 9 tahun dan indeks pendidikan Kota Serang 64,64 dengan rata-rata lama sekolah 8,61 tahun.	0,05	2	0,1
4	Masih rendahnya kontribusi sektor pertanian dengan 70% lebih lahan hanya mampu berkontribusi 6% pada PDRB	0,04	2,2	0,088
5	Potensi sumber daya alam bernilai tinggi seperti Minyak, Gas, Emas, dan lainnya yang relatif kecil. Hanya 0,01% dari PDRB	0,02	2,4	0,048
6	Banjir di sejumlah titik di pusat kota bahkan di jalan protokol akibat rusaknya saluran drainase dari 9.700 m menjadi hanya 5.599 m yang kondisinya baik.	0,02	2	0,04
7	Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Serang seperti drainase, taman bermain anak, trotoar, jalan, tempat pembuangan sampah sementara, penerangan jalan umum dan pasar. Yang masuk kedalam 20 besar kepuasan terendah dalam survey kepuasan masyarakat Kota Serang tahun 2018. Dan proporsi panjang jaringan jalan-jalan dalam kondisi baik masih mencapai 64,01%	0,04	2	0,08
8	Kinerja DPRD Kota Serang yang di bawah rata-rata kepuasan masyarakat tahun 2018.	0,03	2,2	0,066
9	Minimnya penciptaan lapangan kerja yang menempati kepuasan terendah dalam survey kepuasan masyarakat tahun 2018 dengan angka 2.11 dan TPAK yang terus menurun hingga angka 59,21%	0,07	1,6	0,112
10	Gagalnya pengendalian inflasi	0,03	2,2	0,066
11	Terdapat lebih dari 31 perumahan yang berada di wilayah <i>CBD (Central business district)</i> yang tidak sesuai dengan	0,04	2,2	0,088

	fungsi primernya sehingga menyebabkan kemacetan dan banjir.			
12	Tingkat kepadatan penduduk yang menumpuk dipusat kota (Kecamatan Serang) dengan angka (8254/km ²) yang menimbulkan <i>Slum Area</i> 5,56% dari total wilayah	0,03	1,8	0,054
13	Minimnya sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan, ratio gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya 0,110 sedangkan kegiatan hanya 9 kegiatan dari 94 organisasi kepemudaan.	0,03	1,8	0,054
14	Masih rendahnya rumah tangga bersanitasi hanya mencapai 65,51% dari target yaitu 85%	0,03	1,8	0,054
15	Masih rendahnya hasil upaya perlindungan anak dan perempuan dengan ratio KDRT tahun 2017 mencapai 5,73 dan persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur yang meningkat. Dari target 5,56 menjadi 6.25	0,04	1,8	0,072
TOTAL		1,00		2,442

Tabel 4.16
External Factor Analisis Sumary

NO	FAKTOR-FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	SKOR
A	Peluang			
1	Tata kelola pemerintahan yang semakin baik dengan diraihnya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada laporan keuangan Kota Serang tahun 2017	0,06	3,4	0,204
2	Semakin besarnya dukungan pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pembangunan daerah salah satunya melalui revitalisasi kawasan Banten Lama dan program-program lainnya	0,06	3,6	0,216
3	Daya tarik investasi sektor <i>real estate</i> dan konstruksi yang memiliki nilai LQ yang cukup progresif 1,72 dan 1,14 dengan dilihatnya Kota Serang sebagai daerah pemukiman bagi para pegawai Provinsi Banten, para mahasiswa, dan Santri dan <i>Urband Commuters</i>	0,05	3,4	0,17
4	Kesempatan bonus demografi dengan komposisi penduduk usia produktif 71,51% berbanding usia non produktif 29,49%	0,03	2,6	0,078
5	Meningkatnya daya saing perekonomian dengan LPE yang diatas rata-rata nasional dan Provinsi Banten di angka 6,38	0,02	2,6	0,052
6	Terbukanya kesempatan kerja di sektor perdagangan dan jasa sebagai konsekuensi struktur ekonomi modern	0,02	2,4	0,048
7	Sambutan baik masyarakat terhadap transportasi <i>online</i> yang mempunyai nilai kepuasan 3,07 terkatagori tinggi.	0,05	2,8	0,14

8	Nilai investasi PMDN dan PMA yang terus meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh angka Rp. 4.643.775.813.430 dengan total proyek 1.260.	0,06	3,4	0,204
9	Perkembangan ekonomi digital dengan 133 juta pengguna internet dan 115 juta pengguna medsos aktif dengan total transaksi <i>e-commerce</i> 8,2 juta USD tahun 2017 dan <i>digital buyers</i> di Indonesia yang akan terus meningkat hingga 42 juta USD pada tahun 2021	0,07	3,6	0,252
10	Perkembangan ekonomi kreatif yang terus meningkat serta membuka lapangan pekerjaan dengan kekayaan seni budaya dan kearifan lokal di Kota Serang	0,07	3,2	0,224
B	Ancaman			
1	Fluktuasi nilai Kurs IDR terhadap USD	0,05	2,4	0,12
2	Tingginya arus urbanisasi dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah atau tidak memiliki keahlian	0,04	2,4	0,096
3	Ketertiban supporter Klub Sepak Bola	0,05	2,6	0,13
4	Pencemaran lingkungan dengan terbatasnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang hanya 22,56% per 1000 penduduk	0,08	1,2	0,096
5	Sedikitnya jumlah petani yang hanya 2,23% dari penduduk Kota Serang sementara lahan budidaya pertanian tersedia 70,86% sehingga kontribusinya terhadap PDRB hanya 6,46% menurut lapangan usaha	0,06	2	0,12
6	Besarnya pengaruh faktor eksternal ekonomi serta lemahnya resiliensi perekonomian daerah. Dengan laju inflasi yang fluktuatif dan cenderung tidak terkendali	0,04	2,2	0,088
7	Jumlah angkutan umum yang menurun drastis dari 6.782 menjadi hanya 3.767 selain faktor pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin tinggi hadirnya transportasi online juga menjadi salah satu faktor utama hilangnya hampir sebagian angkutan umum di Kota Serang. Jumlah penumpang angkutan juga mengurang dari 791.981 pada tahun 2016 menjadi 678.654 orang di tahun 2017	0,08	2	0,16
8	Nilai investasi yang meningkat setiap tahunnya membuka lapangan kerja sampai 12.197 tenaga kerja. Namun ratio penyerapan tenaga kerja hanya 18,31% artinya daya tawar tenaga kerja Kota Serang belum cukup memadai untuk menyerap seluruh kesempatan kerja yang hadir lewat investasi dengan rata-rata lama sekolah warga Serang yang hanya 8.60 tahun.	0,08	2,4	0,192
9	Menurunnya luas panen yang mengakibatkan menurunnya produksi pangan utama disebabkan karena faktor eksternal seperti faktor cuaca, faktor serangan OPT dan faktor	0,03	2,6	0,078

	bencana alam seperti banjir dan kekeringan dan alih fungsi lahan.			
TOTAL		1,00		2,666

Merujuk pada Rangkuti (1997:48) bobot dalam analisis faktor strategis didasarkan pada tingkat *Urgensy* suatu faktor terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah menggunakan skala 0,1 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Sementara *Rating* diukur berdasarkan skala 4 sampai 1 untuk faktor yang paling mendesak sampai kurang mendesak untuk ditangani dalam jangka waktu tertentu (dalam konteks ini 5 tahun). Dan skor merupakan hasil kali keduanya. Besaran angka yang terdapat pada matriks IFAS dan EFAS dibantu oleh pertimbangan para ahli dengan kapasitasnya masing-masing sebagai berikut:

Table 4.17
List Of Expert

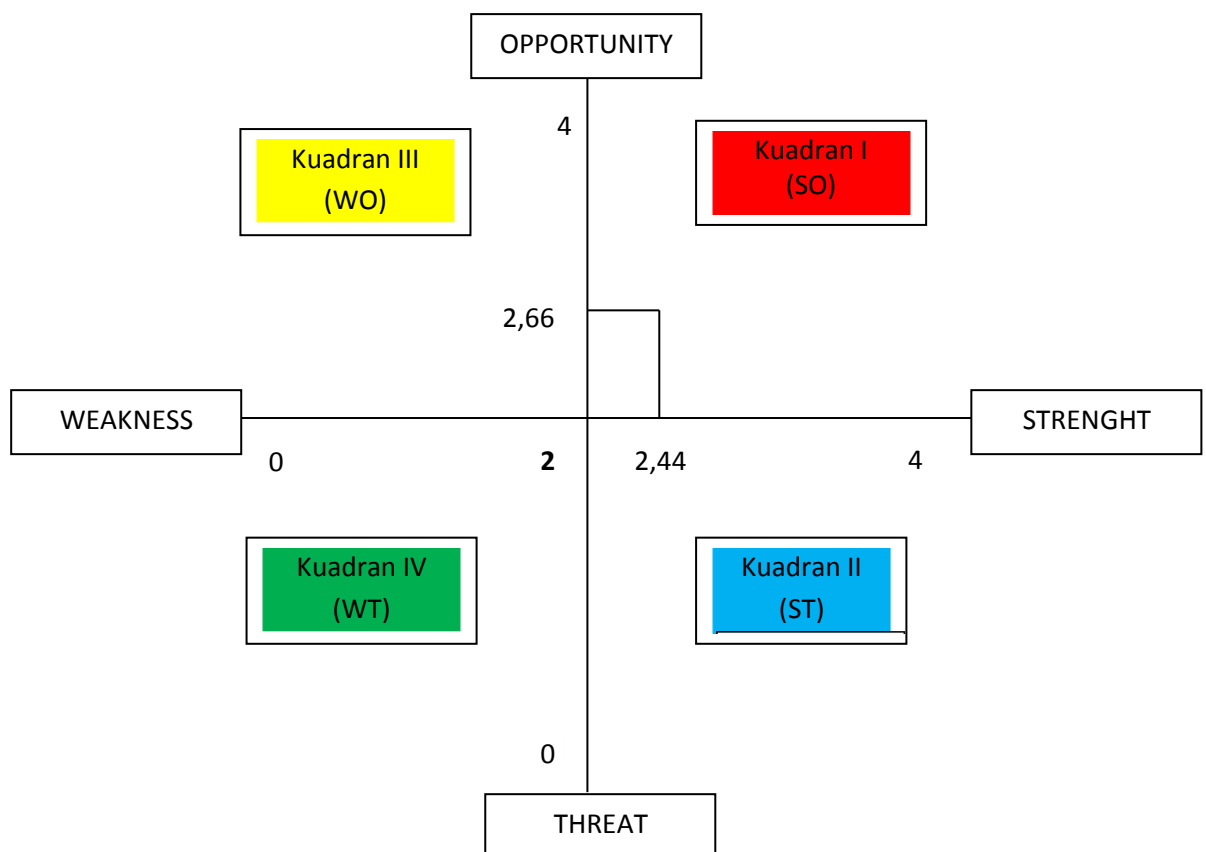
No	Nama	Kapasitas
1	H. Syafruddin, M.Si	Wali Kota terpilih Kota Serang
2	Ir. Joko Sutrisno	Kepala BAPPEDA
3	Kevin Harinusa, MH	DPRD Kota Serang
4	Kandung S.N, M.Si	Ahli Perencanaan Pembangunan
5	Dr. Amas Tajudin	Ketua MUI

Hasil perhitungan tabel IFAS dan EFAS menyatakan bahwa internal faktor berada pada titik 2,47. Ini menggambarkan posisi internal yang lebih condong 0,47 poin kepada Kekuatan dari pada Kelemahan. Sedangkan kondisi eksternal berada pada titik 2,67 itu

artinya kondisi eksternal yang lebih condong 0,67 poin kepada peluang dari pada ancaman.

Untuk menggambarkan posisi kekuatan, kelemahan ancaman dan peluang secara lebih kongret maka dibuat titik kordinat berdasarkan analisis faktor strategis. Titik ini menginformasikan tentang kecenderungan pilihan strategi yang diambil dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. SO, ST, WO, dan WT adalah kuadran yang menunjukkan jenis strategi yang di bangun berdasarkan perhitungan IFAS dan EFAS.

Grafik 4.3
Titik Koordnat IFAS-EFAS



(Sumber: Peneliti diolah 2018)

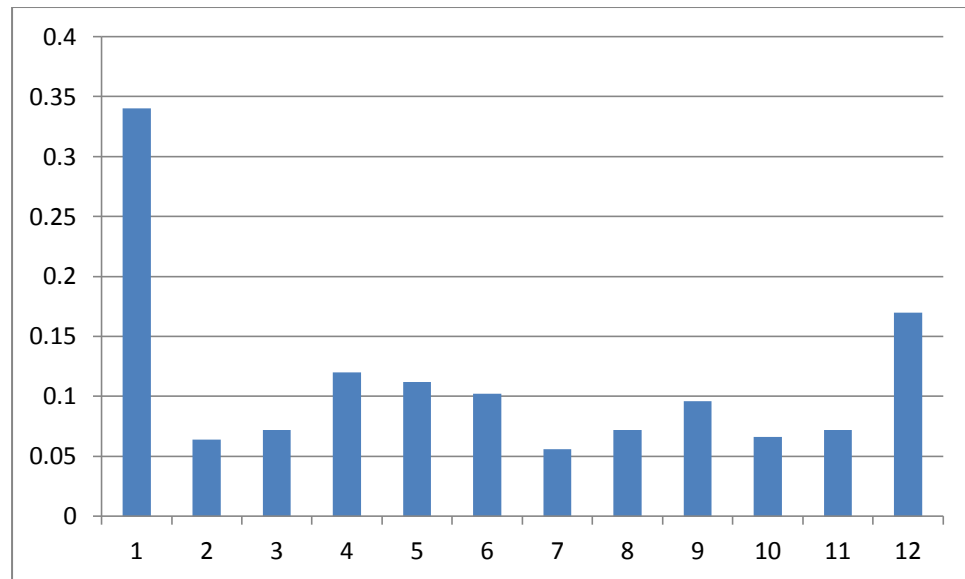
Berdasarkan matriks IFAS-EFAS diatas titik kordinatnya berada pada kuadran I (SO) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis strategi arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2019-2024 mengarah pada strategi kebijakan SO yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki Kota Serang untuk Memanfaatkan atau memaksimalkan peluang yang tersedia.

Setelah diramalkan bahwa arah kebijakan mengarah kepada strategi SO, maka pada bagian terakhir ini akan di rekomendasikan sejumlah alternatif-alternatif kebijakan secara teknokratis dalam RPJMD Kota Serang tahun 2019-2024. Merujuk pada Shafrizal (2016:254) rekomendasi akan dibuat menggunakan matriks TOSW yang bersumber dari tabel IFAS-EFAS dimulai dengan menentukan satu sampai lima faktor internal dan eksternal yang paling strategis.

Pada penelitian ini faktor-faktor yang paling strategis ditentukan dengan bantuan ahli-ahli yang telah tercantum pada tabel 4.13. Penilaian dilakukan secara kuantitatif menggunakan skala likert (1-4) namun dilengkapi dengan keterangan kualitatif yang memberikan informasi atau latar belakang penilaian. Berikut ini disajikan interpretasi hasil penilaian para ahli :

Dari perhitungan nilai LQ tersebut, maka terdapat sejumlah temuan menarik yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan Kota Serang 2019-2024. Di antaranya sebagai berikut :

1. Kekuatan



A	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1	Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.	0,1	3,4	0,34
2	Potensi pertanian	0,02	2,8	0,056
3	Kehidupan beragama yang relatif baik di Masyarakat	0,02	3,6	0,072
4	Potensi wisata religi banten lama	0,03	4	0,12
5	Kemampuan wirausaha	0,04	2,8	0,112
6	Daya beli masyarakat	0,03	3,4	0,102
7	Terjaganya nilai kesenian dan budaya	0,02	2,8	0,056
8	Pegaruh ulama dan tokoh agama	0,02	3,6	0,072
9	Aksesibilitas pendidikan	0,03	3,2	0,096
10	Indikator kinerja layanan kesehatan	0,03	2,2	0,066
11	Peran aktif perempuan dalam masyarakat	0,03	2,8	0,084
12	Geostrategis Kota Serang	0,05	3,4	0,17

Syafrudin ketika ditanya tentang Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi :

“sebagai Ibu Kota tentu Kota Serang menjadi wajah dari Provinsi Banten. Jika provinsi lain di pulau jawa mempunyai Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya sebagai wajah provinsinya tentu Kota Serang juga harus setara dengan kota-kota tersebut. Setara bukan hanya dalam kemewahan kotanya, tapi juga kebahagiaan warga masyarakat yang hidup tenang dan rukun. Itu yang akan kita wujudkan lima tahun kedepan”

KH. Dr. Amas Tajudin ketika ditanya tentang Wisata religi Banten Lama :

“Memang dalam konteks ekonomi sangat menjanjikan dapat dilihat setiap akhir pekan khususnya di bulan Haram (Muharram, Rajab, Dzulqaidah, Zulhijah) kawasan tersebut selalu ramai dikunjungi bukan hanya wisatawan dari Banten tapi dari luar daerah pun ramai-ramai datang ke Banten Lama. Namun yang perlu diperhatikan keberlangsungan ekosistem pariwisatanya dimana peran pemerintah, peran masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat dapat bersinergi satu sama lainnya”

Kevin H ketika ditanya tentang Geostrategis Kota Serang:

“Kota Serang memiliki koneksi erat dengan beberapa daerah, khususnya Jawa Barat, Jakarta dan juga Sumatra. Pertemuan antar pembisnis dari Jawa dan Sumatra dapat bertemu di Kota Serang, atau yang lebih sempit pembisnis dari Lebak dan Tangerang juga bisa bertemu di Serang. Dan seterusnya. Kemudian juga yang menjadi keuntungan banyaknya pengalju (Commuters) orang Serang yang bekerja di Cilegon, Tangerang dan Jakarta”

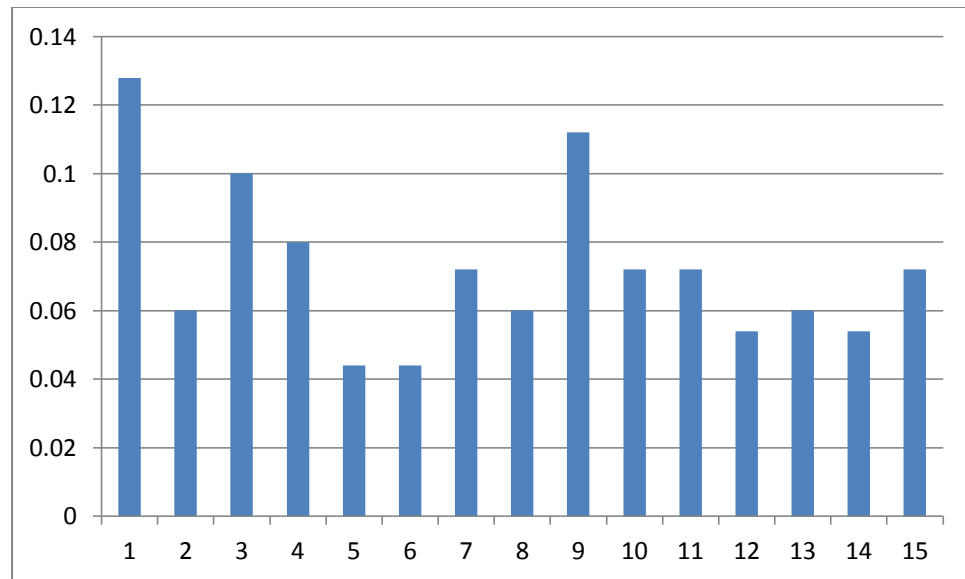
Kandung SN ketika ditanya tentang Daya Beli Masyarakat :

“Saya kira besarnya investasi yang masuk di Kota Serang tadi sampai menyentuh 4 T juga dikarenakan daya beli masyarakat yang tinggi. Tidak mungkin para investor datang pemilik giant misalnya, pasti sudah menghitung berapa perputaran uang yang terjadi di Kota Serang setiap harinya”

Ir. Joko S ketika ditanya tentang UMKM :

“Sektor UMK memang menjadi basis ekonomi di Kota Serang, maka tiap tahunnya kita selalu research itu. Dan selalu kita berupaya meningkatkan usaha yang terkategori mikro ini ke usaha kecil dan menengah dengan bantuan modal dan sebagainya”

2. Kelemahan



B	Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
1	Tingkat pengangguran terbuka	0,08	1,8	0,144
2	KKN	0,03	2	0,06
3	Masih rendahnya kualitas pendidikan.	0,05	2	0,1
4	Masih rendahnya kontribusi sektor.	0,04	2,2	0,088
5	Potensi sumber daya alam bernilai	0,02	2,4	0,048
6	Banjir di sejumlah titik di pusat	0,02	2	0,04
7	Rendahnya kualitas dan kuantitas	0,04	2	0,08
8	Kinerja DPRD	0,03	2,2	0,066
9	Minimnya penciptaan lapangan kerja	0,07	1,6	0,112
10	Gagalnya pengendalian inflasi	0,03	2,2	0,066
11	perumahan yang berada di wilayah <i>CBD</i>	0,04	2,2	0,088
12	Tingkat kepadatan penduduk yang menumpuk dipusat kota	0,03	1,8	0,054
13	Minimnya sarana olahraga dan kegiatan kepemudaan	0,03	1,8	0,054

14	Masih rendahnya rumah tangga bersanitasi	0,03	1,8	0,054
15	perlindungan anak dan perempuan	0,04	1,8	0,072

Syafrudin ketika ditanya tentang Infrastruktur di Kota Serang :

“Untuk mencapai cita-cita Ibukota Provinsi yang saya bilang tadi, tentu infrastruktur menjadi perhatian yang utama, selain harus dalam kondisi baik infratraktur di Kota Serang juga harus ramah anak dan Disabilitas. Saya juga berkeinginan membuat Flyover di depan gerbang Tol Serang Timur agar orang-orang yang masuk ke Kota Serang mengarah langsung ke pusat kota, bukan malah ke luar ke arah kabupaten serang (ciruas).”

KH. Dr. Amas Tajudin ketika ditanya tentang Kualitas pendidikan di Kota Serang :

“Pendidikan di Kota Serang memang saya amati sudah cukup baik aksesnya. Bahkan sekolah ada yang kekurangan murid sekarang. Namun yang sering kali luput dari perhatian adalah pendidikan karakternya (Akhlak). Saya memperhatikan yang baik pendidikan karakternya sekolah di Kota Serang ini adalah sekolah islam-islam terpadu itu lo, tapikan masuk sana mahal. Oleh karena itu saya kira sekolah-sekolah negeri juga patutlah mencontoh sekolah-sekolah islam itu. agar terciptanya itu tadi kualitas pendidikan yang baik di Kota Serang”

Kevin H ketika ditanya tentang Pengangguran di Kota Serang:

“pengangguran memang menjadi ancaman serius karena pengangguran memiliki implikasi negatif yang luas di masyarakat. jika dilihat dari komposisi ketenaga kerjaan di Kota Serang hanya sekitar 12% yang mengenyam pendidikan tinggi. Dan sisanya didominasi oleh lulusan sekolah Dasar dan SLTP, ini menunjukkan permasalahan berakar pada pendidikan. Dengan kualitas SDM yang rendah maka serapan tenaga kerjapun tidak akan maksimal.”

Kandung SN ketika ditanya tentang minimnya penciptaan lapangan kerja :

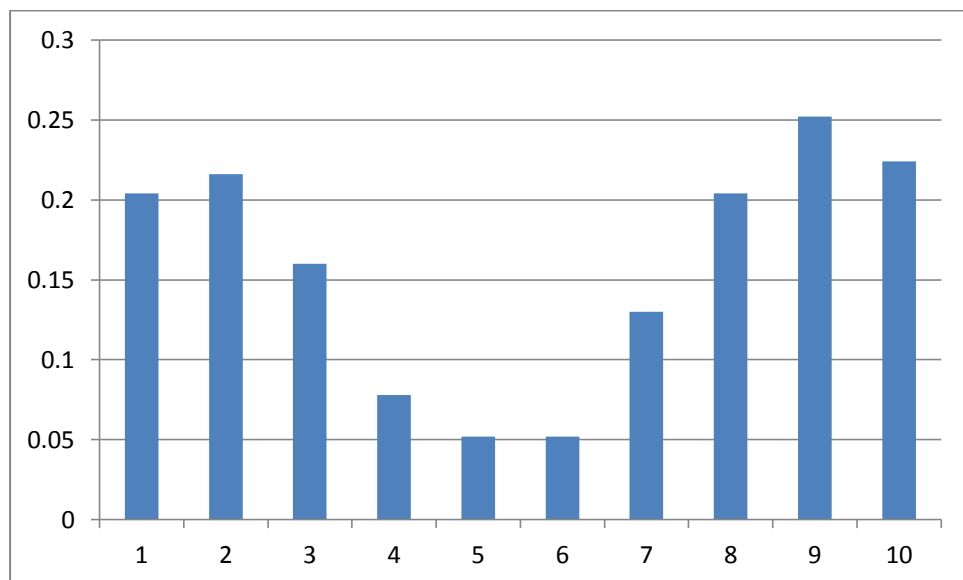
“menurut saya masalah dalam penciptaan lapangan kerja dewasa ini adalah industri atau usaha yang ada sudah tidak padat karya,

tapi terkadang padat modal sehingga fungsi-fungsi manusia sudah tergantikan oleh robotik. Dengan demikian SDM kita harus disiapkan ke arah sana, Kota Serang memiliki BLK (Balai Latihan Kerja) namun ternyata pesertanya yang belajar disana malah banyak orang luar Kota Serang dari pada orang serang sendiri. Ini juga yang jadi masalah”

Ir. Joko S ketika ditanya tentang rendahnya kontribusi sektor pertanian :

“sebenarnya mas, sektor pertanian memang sudah tidak masuk dalam RPJPD Kota Serang 2008-2025 yang SMART itu, namun demikian kita juga tidak bisa menafikan bahwa kontur wilayah kita masih cenderung berciri agraris. Saya memang harus jujur bahwa alih fungsi lahan banyak terjadi yang mungkin memang menjadi salah satu penyebab minimnya produktifitas pertanian. Tapi ini menjadi konsekuensi yang harus diterima untuk mencapai cita-cita RPJPD. Namun juga yang perlu dicatat kita tidak sama sekali mengabaikan sektor pertanian pemberdayaan petani tetap berjalan dan program-program lain pun tetap berlangsung oleh dinas pertanian”

3. Peluang



A	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1	Tata kelola pemerintahan	0,06	3,4	0,204
2	Semakin besarnya dukungan pemerintah Pusat dan Provinsi	0,06	3,6	0,216
3	Daya tarik investasi sektor <i>real estate</i> dan konstruksi	0,05	3,4	0,17
4	Kesempatan bonus demografi	0,03	2,6	0,078
5	Meningkatnya daya saing perekonomian	0,02	2,6	0,052
6	kesempatan kerja di sektor perdagangan dan jasa	0,02	2,4	0,048
7	transportasi <i>online</i>	0,05	2,8	0,14
8	Nilai investasi PMDN	0,06	3,4	0,204
9	Perkembangan ekonomi digital	0,07	3,6	0,252
10	Perkembangan ekonomi kreatif	0,07	3,2	0,224

Syafrudin ketika ditanya tentang dukungan pemerintah pusat dan provinsi :

“Tentu hal itu sangat positif bisa dilihat Banten lama sekarang akan menjadi satu Icon wisata unggulan di Banten, tentu itu satu keuntungan bagi Kota Serang. Begitu juga dengan dukungan pemerintah pusat, dana desa itu sayang kalo Kota Serang ga kebagian. Oleh karenanya saya akan meninjau kembali kelurahan-kelurahan yang masih bisa diubah kembali setatusnya menjadi desa ”

Kevin H ketika ditanya tentang Predikat WTP Kota Serang:

“WTP tidak menjamin kewajaran secara keseluruhan akuntabilitas keuangan yang ada di satu daerah, Kota Serang sendiri masih ada masalah dalam laporan kuangan seperti Terdapat nilai tidak wajar pada saat penyerahaan asset dari Kabupaten Serang tahun 2010 dan juga Belum optimalnya pelayanan informasi PBB terhadap masyarakat. Oleh karena itu jangan jadikan WTP sebuah prestasi yang harus dibanggakan secara berlebihan itu wajar kok mamang sewajarnya harus begitu, jadi jadikan WTP sebagai semangat untuk membangun pemerintahan yang bersih di periode-periode mendatang”

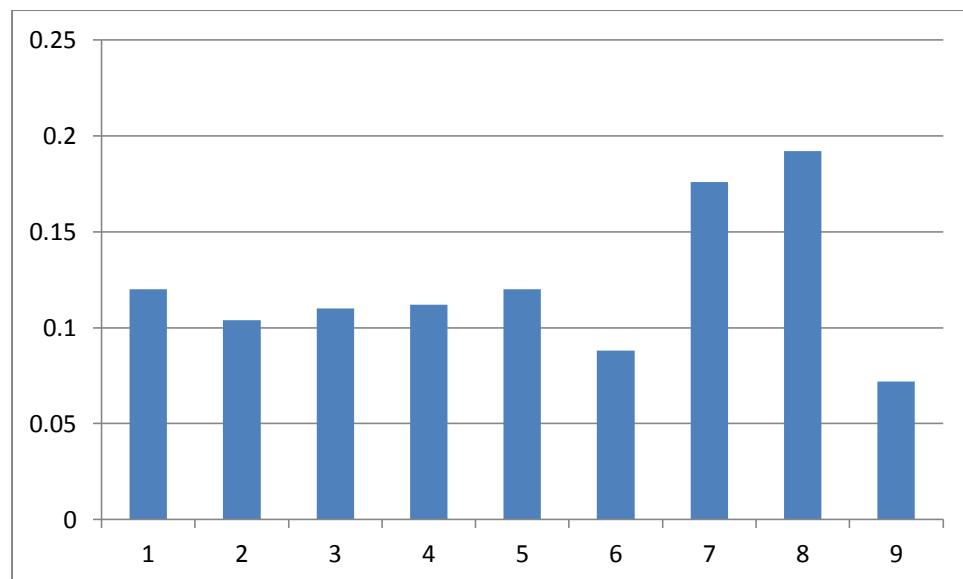
Kandung SN ketika ditanya tentang Investasi di Kota Serang :

“Banten masuk dalam 5 besar daerah dengan PMDN tertinggi Nasional, dengan demikian Kota Serang memang sudah dilirik sebagai tujuan investasi nasional. Namun demikian saya mendengar bahwa patologi birokrasi masih sering terjadi, oknum birokrasi mentransaksikan berbagai macam perizinan. Saya kira itu saja yang menjadi hambatan”

Ir. Joko S ketika ditanya tentang Perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif :

“ini menjadi peluang besar karena dimasa depan semua akan mengarah kearah sana. Mungkin sepuluh tahun lalu kalo kita lapar tengah malam bisanya Cuma masak mie, sekarang bisa pesen makan lewat Go Food itu lo. Artinya ide-ide seperti ini harus sering dimunculkan dan tentunya harus didukung dengan pengetahuan digital yang memadai”

4. Ancaman



B	Ancaman			
1	Fluktuasi nilai Kurs IDR terhadap USD	0,05	2,4	0,12
2	Tingginya arus urbanisasi	0,04	2,4	0,096
3	Ketertiban supporter Klub Sepak Bola	0,05	2,6	0,13

4	Pencemaran lingkungan	0,08	1,2	0,096
5	Sedikitnya jumlah petani	0,06	2	0,12
6	Besarnya pengaruh faktor eksternal	0,04	2,2	0,088
7	Jumlah angkutan umum yang menurun	0,08	2	0,16
8	penyerapan tenaga kerja	0,08	2,4	0,192
9	Menurunnya luas panen	0,03	2,6	0,078

Syafrudin ketika ditanya tentang Urbanisasi :

“kita ga bisa menghalangi orang untuk datang ke Kota Serang oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kalitas SDM kita sendiri agar tidak tertinggal dari kaum pendatang”

KH. Dr. Amas Tajudin ketika ditanya Sedikinya jumlah petani :

“ini pada dasarnya merupakan masalah mindset bahwa orang lebih bangga menjadi buruh pabrik dari pada petani, petani menjadi pilihan terakhir dan bahkan ada pilihan paling akhir lagi yaitu jadi buruh tani. Sudah buruh tani lagi. Oleh karenanya pembedaan mindset juga penting dilakukan agar orang desa tidak lagi menjual sawahnya untu beli mobil. Tapi sawahnya di garap sendiri untuk memberi makan warga kampungnya dan warga Kota Serang secara luas”

Kandung SN ketika ditanya tentang Pencemaran Lingkungan :

“polusi udara sudah pasti dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan dan industrialisasi. kemudian yang paling mengawatirkan adalah kali cibanten, selain pencemaran oleh sampah rumah tangga dampak galian pasir yang membuang limbahnya ke kali cibanten juga membuat pendakalan di kali jadilah kali cibanten yang sekarang ini padahal dahulu kala kali cibanten memegang peranan strategis pemenuhan kebutuhan hidrologi di Kota Serang dan bahkan menjadi sarana transportasi”

	<p>sebagai pusat ekonomi.(S2,O4,O5)</p> <p>3. Memanfaatkan dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan wisata religi Banten Lama dengan menggalakan atau menggiatkan Ekonomi Kreatif (S3,O2,O5)</p> <p>4. Meningkatkan kreatifitas dan digitalisasi UMKM dalam menghadapi persaingan perdagangan yang semakin luas. (S4,O5,O4)</p> <p>5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menjaga daya beli masyarakat melalui peran pemerintah (S5,O3,O2,O1)</p>	
Kelemahan	W-O	W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Kualitas Pendidikan 3. Produksi Pertanian 4. Lapangan Pekerjaan 5. Tata Ruang Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja melalui Industri Kreatif berbasis kearifan lokal dan pendidikan melek ekonomi digital untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dalam rangka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan permintaan tenaga kerja melalui investasi khususnya di sektor pertanian untuk menghindari urbanisasi. (W1,W2,W3,W4,T1,T3,T5) 2. Penataan ruang kota

	menekan angka pengangguran terbuka. (W1,W4,W2,O4,O5)	dan wilayah yang terbarukan untuk mencegah penemuan lingkungan dan alih fungsi lahan secara eksploitatif. Serta arus transportasi untuk menghindari kemacetan. (W5,T3,T2,T4)
--	---	---

(Sumber : Peneliti diolah, 2018)

Berdasarkan Matriks SWOT ini terdapat empat kuadran yang berisikan kelompok strategi pembangunan daerah yang dihubungkan dengan menggunakan dua atau lebih unsur faktor strategi yang terkait. Keempat kelompok strategi tersebut adalah : Strategi S-O (Kuadran I), strategi S-T (Kuadran II), strategi W-O (Kuadran III), dan strategi W-T (Kuadran VI). S-O Strategi diperoleh dengan jalan memanfaatkan unsur kekuatan untuk merebut peluang yang tersedia (*Growth Oriented Strategy*).Istrategi S-T diperoleh dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki Kota Serang untuk menghilangkan ancaman pembangunan yang diperkirakan dapat terjadi (*Defensive Strategy*)I Strategi W-O dirumuskan dengan jalan mengurangi kelemahan yang terdapat di Kota Serang untuk merebut peluang pembangunan yang tersedia (*Internal Adjustment Oriented*). Sedangkan strategi W-T dihasilkan dengan jalan mengatasi kelemahan untuk menghilangkan ancaman. (*Self-defence strategy*).

Mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh sistem matriks SWOT tersebut maka dapat dirumuskan delapan strategi pokok sebagai arah kebijakan pembangunan Kota Serang pada tahun 2019-2024. Sesuai dengan peramalan

strategi akan lebih di arahkan kepada strategi yang ekspansif (*S-O strategy*) berdasarkan hasil perhitungan tabel IFAS-EFAS.

Delapan strategi arah kebijakan pembangunan Kota Serang pada tahun 2019-2024 berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pertahankan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai ibukota provinsi untuk menarik lebih banyak investasi.
2. Pemanfaatan Geostrategis Kota Serang sebagai daerah transit dari pintu gerbang masuk ke pulau jawa di Kota Cilegon, dan penengah antara daerah Rural dan Urban dalam hal ini Banten Selatan dan Banten Utara sebagi pusat ekonomi.
3. Pemanfaatan dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan wisata religi Banten Lama dengan menggalakan atau menggiatkan Ekonomi Kreatif.
4. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menjaga daya beli masyarakat melalui peran pemerintah.
5. Penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai komitmen Ibukota Provinsi yang bersih dan nyaman.
6. Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja melalui Industri Kreatif berbasis kearifan lokal dan pendidikan melek ekonomi digital untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka.

7. Peningkatan kualitas pendidikan untuk menjawab tantangan permintaan tenaga kerja melalui investasi khususnya di sektor pertanian untuk menghindari urbanisasi.
8. Penataan ruang kota dan wilayah yang terbarukan untuk mencegah penemaran lingkungan dan alih fungsi lahan secara eksploitatif. Serta pola transportasi untuk menghindari kemacetan.

Rekomendasi Akhir

Setelah mengetahui rekomendasi arah kebijakan dan strategi pada masing-masing teknik analisis. Pada bagian akhir ini akan dibuat rekomendasi dengan menggabungkan hasil dari kedua teknik analisis. Masing-masing sektor basis hasil perhitungan LQ akan dibuatkan strateginya menggunakan *SO strategy* hasil analisis SWOT :

- a. Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, penyediaan akomodasi makan dan minum serta kegiatan sosial dan Jasa kesehatan, pendidikan, jasa lainnya

S	O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Kota Provinsi 2. Posisi Geostrategis 3. Pelayanan kesehatan 4. Aksesibilitas pendidikan 5. Terjaganya situs dan nilai kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini WTP 2. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi 3. Bonus Demografi

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial jawib yang merupakan pemegang sektor basis terkuat tidak dipungkiri merupakan konsekuensi Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Dengan demikian Kota Serang dituntut untuk menghadirkan pelayanan terbaik tidak hanya untuk warga masyarakat serang namun sebagian warga banten bahkan indonesia sebagai konsekuensi menjadi ibu kota provinsi. Kegiatan-kegiatan seperti rapat kordinasi se-provinsi banten, kunjungan pemerintah pusat pasti akan digelar di Kota Serang sebagai ibukota, kegiatan peradilan, per undang-undangan (legislasi), pertahanan dan jaminan sosial. Oleh sebab itu Kota Serang harus menata tata ruang kota yang layak untuk menjadi “*wajah*” Provinsi Banten sebagai ibukota provinsi.

Tidak hanya pada sektor pemerintahan, letak geostrategis Kota Serang pun menunjang untuk menjadi *TOD (transit oriented district)* dimana Kota Serang menjadi penghubung anantara *rural area* (banten selatan) dan *urban area* (banten utara). Dengan demikian pergerakan barang dan manusia akan sangat tinggi melintasi Kota Serang yang pada akhirnya menjadi pilihan transit. Oleh sebab itu Kota Serang harus menghadirkan pelayanan terbaik memlalui penyediaan akomodasi makan dan minum yang merupakan sektor basis kedua dikota serang. Penyediaan hotel dan sarana tranportasi berkualitas, kuliner dan penyediaan kebutuhan lain untuk para transitor harus menjadi perhatian Kota Serang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya Kota Serang merupakan pusat pelayanan publik tidak hanya untuk warga Serang namun sebagian warga Banten dan Indonesia. Untuk itu Kota Serang juga harus memberikan perhatian penuh pada penyediaan layanan pokok yaitu pendidikan dan kesehatan yang juga merupakan sektor basis. Jasa pendidikan misalnya, berdasarkan data BPS (2017) tercatat terdapat sekitar 175 pondok pesantren salafiyah (tradisional), dan 26 pondok pesantren khalafiyah (modern) yang berlokasi di wilayah Kota Serang. Serta 20 perguruan tinggi negeri dan swasta. Artinya Kota Serang memiliki daya tarik yang cukup kuat sebagai tujuan ideal para penuntut ilmu khususnya di Provinsi Banten.

Dari jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagaimana yang telah dijelaskan pula di paragraf sebelumnya bahwa posisi geostrategis Kota Serang yang sangat menunjang sebagai pusat layanan jasa salah satunya jasa kesehatan. Sebagai contoh pada saat terjadinya bencana tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 yang lalu, sebagian besar korban yang tidak tertampung di rumah sakit Pandeglang dirujuk ke beberapa rumah sakit di Kota Serang sebagai wilayah yang paling dekat dengan wilayah terdampak bencana. Artinya posisi geostrategis sebagai sentral dan ibu kota Provinsi Banten sangat menunjang apabila dikembangkan menjadi pusat layanan jasa salah satunya jasa kesehatan yang berkualitas.

Begitu pula dengan jasa lainnya, yang dimaksud jasa lainnya adalah kegiatan kesenian, hiburan, rekreasi, jasa reparasi komputer dan perlengkapan

rumah tangga. Sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan terutama dari Kesultanan Banten. Kota Serang memiliki peluang yang menguntungkan dengan sebangun direvitalisasinya kawasan cagar budaya Banten Lama yang tentu saja hal semacam ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam arti hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi dan pengoptimalan potensi wisata yang dimiliki Banten Lama. Sebagai daerah yang terkategori sebagai kota besar dengan penduduk lebih dari 600 ribu jiwa jasa reparasi komputer dan peralatan rumah tangga sudah pasti menjadi kebutuhan di Kota Serang.

Untuk menjawab seluruh tantangan di atas maka dibutuhkan strategi yang tepat guna memaksimalkan potensi yang dimiliki Kota Serang secara ekspansif. *Smart City* merupakan satu konsep yang dapat menjawab tantangan tersebut. Kota Pintar adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan *smart city* Kota Serang dimungkinkan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada seperti promosi dan *branding* Kota untuk menjaring banyak kegiatan yang akan menjadi pemasukan bagi Kota Serang, meningkatkan pelayanan publik diseluruh sektor dengan konten-konten digital atau aplikasi yang pada akhirnya akan membantu menghemat waktu dan biaya bagi warga masyarakat.

b. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

S	O
1. Daya Beli masyarakat	1. Struktur ekonomi modern
2. UMKM	2. Ekonomi kreatif dan digital

Sebagaimana kota-kota pada umumnya sektor yang menjadi tulang punggung adalah perdagangan. Untuk itu pemerintah perlu memastikan iklim usaha yang sehat guna menjaga roda perekonomian tetap berputar. Dengan status Kota Serang yang sudah merupakan kota besar, tentu pusat-pusat perbelanjaan harus ditata. Keseimbangan antara pasar tradisional dan modern perlu menjadi perhatian. Beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemkot Serang adalah selektif dalam memberi izin usaha, dalam arti mempermudah usaha kecil dan mikro untuk berkembang namun harus berhati-hati pada izin usaha besar yang berpotensi mengancam keberlangsungan usaha kecil. Karena di Kota Serang sendiri masih didominasi usaha kecil dan mikro, untuk itu usaha kecil dan mikro inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah kota. Beberapa strategi yang lainnya adalah membuat portal promosi dan tax amnesty.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “apa arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2019-2024 menggunakan metode *LQ* dan *SWOT* ? “. Berdasarkan deskripsi data PDRB yang kemudian dianalisis menggunakan metode *LQ* dihasilkan gambaran data tentang sektor basis yang kemudian menjadi masukan dalam menentukan faktor strategis arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2019-2024. Gambaran hasil perhitungan *LQ* tersebut kemudian di padukan dengan data indikator pembangunan lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Dengan perpaduan data di atas terciptalah Faktor-faktor strategis penentu arah kebijakan pembangunan Kota Serang tahun 2019-2024 yang kemudian dinilai oleh para ahli untuk menentukan kemana arah pembangunan akan dituju.

Hasilnya Arah Kebijakan pembangunan Kota Serang menggunakan metode *SWOT* mengarah kepada strategi yang ekspansif (*S-O Strategy*). Sementara hasil analisis *LQ* mengarahkan kebijakan pembangunan pada sektor : Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, Konstruksi, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Jasa pendidikan, Real estate, dan Jasa lainnya.

Dengan demikian arah kebijakan menurut metode LQ sudah sesuai dengan visi RPJMD 2014-2018 yaitu “ Kota Serang madani sebagai Kota Pendidikan yang bertumpu pada potensi perdaganga, jasa, pertanian dan budaya. Hanya sektor pertanian yang tidak sesuai dengan hasil LQnya. Sementara ketidak sesuaian lain terdapat pada hasil analisis *SWOT*. *SWOT* menyatakan strategi pembangunan Kota Serang mengarah pada strategi ekspansif (*S-O strategy*) sementara Strategi arah kebijakan pembangunan Kota Serang pada dokumen RPJMD 2014-2019 terkatagori (*W-T self-defence*).

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat menyampaikan beberapa rekomendasi arah kebijakan yang baru sebagai irisan dari strategi yang telah ada sebelumnya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan wisata religi Banten Lama dengan menggalakan atau menggiatkan Ekonomi Kreatif.
2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menjaga daya beli masyarakat melalui peran pemerintah.
3. Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja melalui Industri Kreatif berbasis kearifan lokal dan pendidikan melek ekonomi digital untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Agustino Leo. 2016. *Dasar-Dasa Kabijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Sjafrizal . 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Creswell w, john. 2016. *Reasearch Design*. Yogyakarta: Pestaka Pelajar.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kabijakan Public*. Yogyakarta: Gajah.Mada University Perss.
- Sukandarrumidi, 2006 *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Rangkuti, Freddy, 2014. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Perss

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Periode 2012-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang 2013-2018

Banten Dalam Angka 2018

Serang Dalam Angka 2018

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Statistik Daerah Kota Serang 2018

Statistik Daerah Provinsi Banten 2018

Buku Saku PDRB Provinsi Banten 2014-2017

Jurnal Penelitian:

Melissa P. Johnston Ph.D . 2014. *Secondary Data Analysis : A Method of Which The Time Has come*. School of Library and Information studies, University of Alabama USA: jurnal

Yusuf Hasbullah. 2012. "Analisis arah Kebijakan Ekonomi Terhadap sektor Pendidikan dalam peningkatan IPM", , Universitas Negeri Semarang, Skripsi

DR. Ismanto. 2017. Potensi Unggulan Kota Serang 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Kajian Praktis

Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, 2009. "Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah : Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 10. No. 1.

Sumber Lain:

<http://bisnis.liputan6.com/read/2158516/61-ribu-koperasi-bakal-dibubarkan-januari>, diunduh pada hari rabu, 01 April 2015 pukul 20.15 WIB). Serangkota.go.id

LAMPIRAN

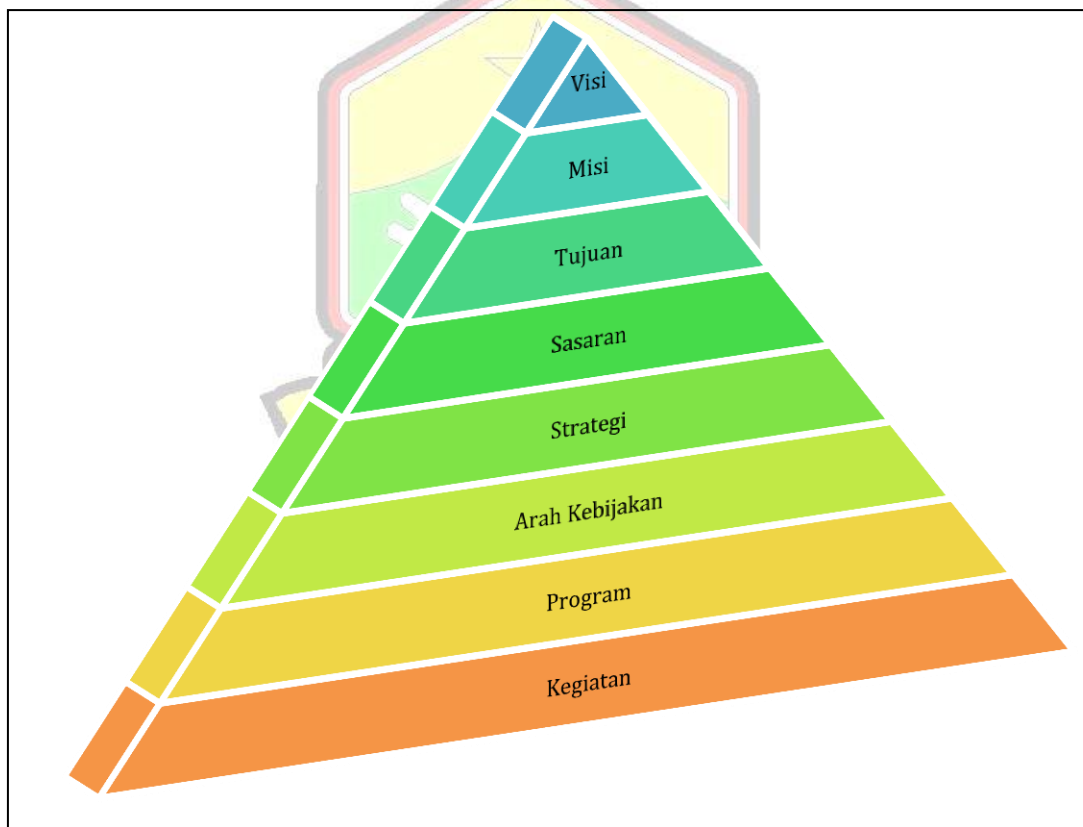


BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dapat dipahami sebagai sekumpulan cara yang direncanakan secara cermat dan teliti guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi merupakan operasionalisasi dari misi, yang disusun guna memastikan bahwa setiap misi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya strategi dikembangkan sesuai dengan misi yang hendak dilaksanakan. Demikian pula halnya dengan arah kebijakan, yang pada dasarnya merupakan arah atau tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan. Relasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan hingga program dan kegiatan dapat dianalogikan secara grafis sebagai berikut:

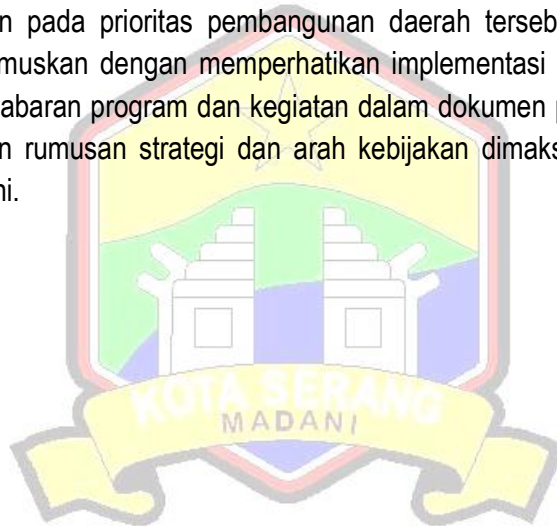
Gambar 6.1
**Relasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan**



Berdasarkan dokumen visi dan misi calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Serang Tahun 2013 lalu, maka Strategi dan Arah Kebijakan dirumuskan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang menjadi janji politik Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen visi dan misi dimaksud. Berdasarkan lima pilar pembangunan yang diintrodusir pada bab 5, prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur wilayah yang berorientasi pada penguatan peran dan fungsi Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten;
2. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan memprioritaskan pada pencapaian Wajib Belajar 9 tahun yang digratiskan;
3. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Peningkatan potensi Ekonomi Kerakyatan;
5. Optimalisasi Potensi Pertanian dan Kelautan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat;
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan pembinaan kesadaran hukum; serta
7. Peningkatan Penghayatan terhadap Nilai Agama melalui pembinaan dan pengembangan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Berpedoman pada prioritas pembangunan daerah tersebut, maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan implementasi prioritas pembangunan tersebut dalam penjabaran program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan di tingkat operasional. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Serang

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
MISI I : Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa			
1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1. Peningkatan kualitas, kinerja, dan disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis fungsional yang relevan
		2. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran / kerja	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
		3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas	1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Optimalisasi Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
3. Mewujudkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pembangunan	1. Terwujudnya keterbukaan informasi bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan	1. Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi	1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		pembangunan	daerah
MISI II : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, anak, dan lansia	1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuju rintisan wajib belajar 12 tahun	1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Gratis	1. Meningkatkan cakupan layanan Pendidikan Dasar dan menengah yang Bermutu dan Gratis
			2. Meningkatkan Perluasan Pendidikan Non Formal dan Minat Baca Masyarakat
			3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, serta kompetensi tenaga kerja
			4. Meningkatkan Kualitas SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Manajemen Pelayanan Pendidikan
	2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak serta masyarakat miskin	1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau serta Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan	1. Meningkatkan cakupan layanan puskesmas dan jaringannya
		2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan layanan kesehatan bermutu

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		kesehatan	
		3. Pembinaan dan Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	1. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
	3. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan penyakit masyarakat	1. Peningkatan Pelayanan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan PMKS
	4. Meningkatnya kesetaraan gender serta kesejahteraan anak dan lansia	1. Peningkatan kesetaraan gender, kesejahteraan anak dan lansia	1. Meningkatkan kesetaraan gender, kesejahteraan anak dan lansia
		2. Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI III : Menyediakan Prasarana Dan Sarana Wilayah Sebagai Pendorong Kemajuan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat, Serta Pengendalian Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan	1. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa	1. Peningkatan Kapasitas Kebijakan, Peraturan, Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang	1. Meningkatkan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan	1. Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas prasarana jalan dan

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			jembatan
		3. Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan serta komunikasi dan informasi	1. Membangun, Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Sistem Jaringan Angkutan Umum dan Sarana Transportasi, komunikasi dan informasi
	2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air, drainase dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian banjir;	1. Penataan dan Pengembangan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	1. Meningkatkan Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pengembangan Daya Dukung dan Kualitas Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
		2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan	2. Memelihara, Merehabilitasi dan Meningkatkan Daya Dukung Drainase dan Pengendalian Banjir
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kualitas infrastruktur energi, ketenagalistrikan dan telekomunikasi;	1. Pengendalian pencemaran dan tata ruang kota secara efektif	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Perlindungan, Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam
	4. Tersedianya sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup listrik, energi, persampahan, air bersih, air limbah, pemadam kebakaran, tempat pemakaman umum, pasar, dll);	1. Penataan dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Permukiman	1. Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat
			2. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan, air

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			bersih, pemadam kebakaran, TPU, listrik, dan prasarana pemukiman lainnya.
		2. Pengendalian pemanfaatan ruang	1. Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW
	5. Terwujudnya ruang publik atau ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga kota, serta beraktivitas sosial, olahraga, seni, maupun budaya;	1. Penyediaan dan pemeliharaan taman kota dan RTH sebagai ruang publik	1. Membangun, memelihara, dan mendayagunakan taman kota/RTH sebagai ruang publik yang memiliki nilai guna tinggi bagi pengembangan kehidupan sosial dan budaya masyarakat
MISI IV : Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Penciptaan Iklim Usaha Dan Investasi Yang Kondusif Bagi Berkembangnya Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi, Serta Industri Yang Mampu Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Sosial Secara Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.	1. Meningkatkan aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi	1. Mengembangkan dan Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dan perindustrian
			2. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas pertanian dan pangan
		2. Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan pariwisata	1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas manajemen, pemasaran SDM, Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata
	2. Berkembangnya pariwisata melalui	1. Pengembangan nilai ekonomi dari	1. Mengembangkan nilai ekonomi dari potensi

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	pengembangan potensi seni dan kebudayaan daerah	potensi seni dan kebudayaan daerah	seni dan kebudayaan daerah
	3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UKM dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing	1. Pembinaan dan Peningkatan Akses UKM Terhadap Sumber Daya Produktif (SDM, Manajemen, Pasar, Modal, Keterampilan Usaha)	1. Menata, Mengembangkan dan Meningkatkan Kapasitas, Kualitas, dan Produktivitas UKM serta Iklim Kewirausahaan
		2. Penguatan kelembagaan koperasi dengan meningkatkan jumlah koperasi aktif	1. Membina dan mengembangkan koperasi
	4. Meningkatnya kesempatan berusaha dan lapangan kerja	3. Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Mengembangkan dan Meningkatkan Lapangan Kerja, Kesempatan Kerja, Keterampilan dan Keahlian Tenaga kerja
MISI V : Mewujudkan Iklim Kehidupan Sosial Dan Politik Yang Relijius, Berbudaya, Aman, Dan Tertib Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal Masyarakat, Serta Pembinaan Seni, Budaya, Dan Olahraga Di Kalangan Generasi Muda			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta iklim sosial dan politik yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan daerah	1. Meningkatnya kesadaran hukum dan politik masyarakat	1. Pembinaan kesadaran hukum dan politik bagi masyarakat	1. Meningkatkan kualitas kesadaran hukum dan politik masyarakat
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mengatasi bencana alam	1. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi bencana	1. Peningkatan mitigasi bencana melalui peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan	1. Meningkatkan kualitas mitigasi bencana

VISI : “Terwujudnya Kota Serang Madani sebagai Kota Pendidikan yang Bertumpu pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, dan Budaya”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3. Membina dan meningkatkan potensi dan prestasi pemuda	1. Meningkatnya prestasi seni, olahraga, dan kewirausahaan berbasis pemanfaatan potensi pertanian di kalangan pemuda dan masyarakat.	1. Peningkatan Meningkatnya prestasi seni, olahraga, dan kewirausahaan berbasis pemanfaatan potensi pertanian di kalangan pemuda dan masyarakat.	1. Mengembangkan potensi dan prestasi pemuda di bidang seni, olahraga, dan kewirausahaan pemuda dan masyarakat
4. Merevitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam membangun jatidiri masyarakat dan Kota Serang yang madani	1. Berkembangnya iklim kehidupan masyarakat dan kelembagaan sosial yang berkarakter, serta berperan vital dalam pelestarian dan pengembangan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Serang	1. Pengembangan iklim kehidupan masyarakat dan kelembagaan sosial yang berkarakter, serta berperan vital dalam pelestarian dan pengembangan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Serang	1. Mengembangkan iklim kehidupan masyarakat dan kelembagaan sosial yang berkarakter, serta berperan vital dalam pelestarian dan pengembangan budaya dan kearifan lokal masyarakat Kota Serang
	2. Meningkatnya kerukunan antarumat beragama, serta toleransi atas perbedaan SARA di kalangan masyarakat	1. Peningkatan kerukunan antarumat beragama, serta toleransi atas perbedaan SARA di kalangan masyarakat	1. Meningkatkan kerukunan antarumat beragama, serta toleransi atas perbedaan SARA di kalangan masyarakat

DOKUMENTASI



H. syafrudin, M.Si
Walikota Terpilih Kota Serang



Sekretaris Bappeda Kota Serang



Dr. Amas Tajudin



Curriculum Vitae

Tanggal Pengisian (05/05/2017) :

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Alipsyah Barlin

Nama Panggilan : Alip/ Arlin

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 6661141856

Nomor Telepon/HP : 089666446656

Alamat email : Alipsyahbarlin@gmail.com

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 03 November 1996

Alamat tinggal sekarang : Jln KH. Ahmad Khotib NO.13 RT.05 RW. V Cipare

Alamat sesuai KTP : Jln Raya sukanegara RT 01 RW I bulok Kab. Tanggamus Lampung

Nomor KTP : 1806270311960001

Agama : Islam

Hobby : Menonton

Status Pernikahan : Belum Menikah

Sedang Menerima Ikatan Dinas : Tidak



D. Pendidikan

	Nama Sekolah dan Kota	Dari Tahun s/d Tahun	Keterangan
Sekolah Dasar	SDN 1 SUKANEGARA TANGGAMUS	2003-2009	LULUS TEPAT WAKTU
SLTP	SMPN 1 BULOK TANGGAMUS	2009-2011	LULUS TEPAT WAKTU
SLTA	SMAN 1 GADINGREJO PRINGSEWU	2011-2014	LULUS TEPAT WAKTU

E. Bahasa Asing yang dikuasai

Bahasa	Aktif/Pasif
1. ENGLISH (US)	AKTIF
2. JERMAN	PASIF
3. ARAB	PASIF

F. Kegiatan Ekstrakurikuler/kursus/pelatihan yang pernah diikuti

Jenis Kegiatan	Institusi Penyelenggara	Tahun
1. Kursus Bahasa Inggris - English For Adult - Convergence class	LIA	2013-2015
2. Pelatihan Kepariwisata	Kementrian Pariwisata RI	2017
3. Pelatihan Design Grafis	Departemen media Fosmai	2017
4. Pelatihan pemilih pemula	KPUD Banten	2016
5. Sekolah Parlemen	MPR RI	2015,2016,2017
6. LDK- Latihan kepemimpinan tingkat 1-2	OSIS, HIMANE, BEM FISIP	2016
7. Seminar Internasional " Indonesia sebagai poros maritim dunia"	Laboratorium Administrasi Negara	2016
8. Seminar Nasional oleh Wakil presiden RI (Reformasi Birokrasi)	Administrator Muda Indonesia	2015
9. Program internalisasi mahasiswa tarbiah	Fosmai Fisip	2012-2014

10. Latihan rutin bola basket	Ekskul Basket SMAN 1 Gadingrejo	2012-2013
11. Pramuka-paskibra	SMAN 1 Gadingrejo	2012-2013
12. English Club	EC SMAN 1 Gadingrejo	

G. Aktivitas Keorganisasian

Organisasi	Nama kegiatan	Jabatan	Tahun
1. OSIS	Progja : bulan bahasa, class meeting, MOS, smanding berkurban, etc.	<ul style="list-style-type: none"> Sie 1 (keagamaan) Wakil ketua 	Smp-sma 2008,2012,2013
2. HIMPUNAN MAHASISWA ADMINISTRASI NEGARA	Progja : Smart quake, Ane Eduwisata, Sunatan masal, Ane Saintific Fair, kajian Akademik, etc.	<ul style="list-style-type: none"> Divisi pengabdian masyarakat Ketua umum 	2015-2016
3. Forum Mahasiswa islam FISIP	Progja : FRESH, IFTORJAMA'I, GOES TO IBF, FOSMAI VAGANSA(BAKSOS), etc.	<ul style="list-style-type: none"> Moeslem Development Canter 	Sampai sekarang
4. Pers Mahasiswa	Prgja : Buletin, majalah, dialy news	<ul style="list-style-type: none"> Seretaris Fisip Corner 	

H. Prestasi/penghargaan yang pernah diraih

Prestasi/Penghargaan	Penyelenggara	Tahun
Delegasi pertemuan Ilmiah mahasiswa ADM. Negara se Indonesia	TEMU ADMI UNPAD JATINANGOR	2016
Pringkat 8 olimpiade sains nasional Ekonomi	Panitia osn	2013